



# KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI (TPP) ASN TA 2022 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

Oleh:

**Dr. BAHRI, S.STP, M.Si**

**Direktur Perencanaan Anggaran Daerah  
Ditjen Bina Keuangan Daerah**





# DASAR HUKUM PEMBERIAN TPP

1

**Pasal 58  
PP 12/2019  
(6 Maret 2019)**

- Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.
- Dalam hal belum adanya Peraturan Pemerintah, Kepala Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi Pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri yang ditetapkan setelah memperoleh pertimbangan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

2

Lampiran  
C.2.l).a).(f) &  
Lampiran E.7.d  
PMDN 27/2021  
(4 Agustus 2021)

- Pemberian TPP ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada PP yang besaran standar satuan biaya TPP dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- Persetujuan diajukan melalui Dirjen Bina Keuda dengan menggunakan [sipd.kemendagri.go.id](http://sipd.kemendagri.go.id)
- Pemerintah daerah menganggarkan TPP sebagaimana pasal 58 PP 12/2019, dengan mepedomani:
  - ✓ Menggunakan hasil evaluasi jabatan;
  - ✓ Mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium;
  - ✓ Pemberian sanksi administratif.

3

**KEPMEN 900-4700  
Tgl 21 Desember 2020**

Persetujuan tertulis Mendagri melalui Ditjen Bina Keuda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi kriteria TPP pada setiap jabatan.

4

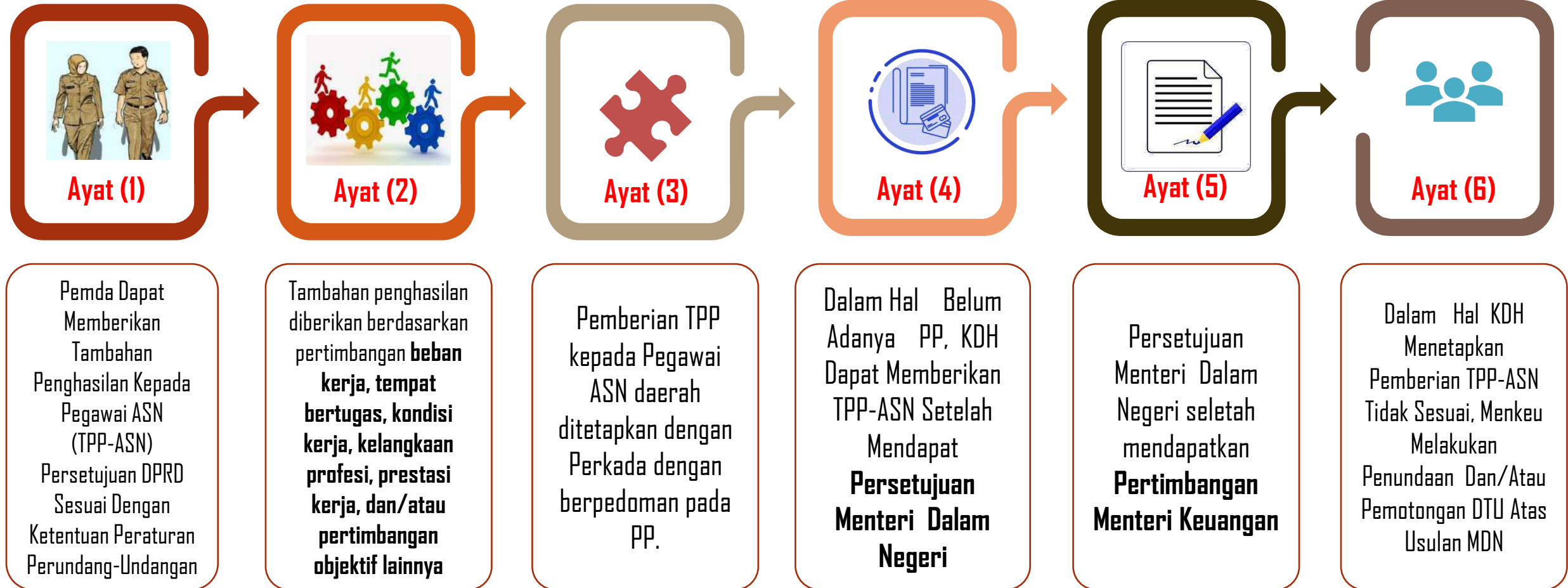
**SE MENDAGRI  
900/4834/SJ  
TGL 6 September  
2021**

Validasi Perhitungan TPP TA 2022 disampaikan ke Sekjen u.p. Kepala Biro Organisasi dan Tatalaksana Kemendagri melalui aplikasi [simona.kemendagri.go.id](http://simona.kemendagri.go.id)



# KEBIJAKAN PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI ASN

AMANAT PASAL 58 PP 12/2019



## KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN PEMDA (PENJELASAN PASAL 58 PP 12 TAHUN 2019)

1 Berdasarkan **beban kerja**, diberikan kepada Pegawai ASN yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

2 Berdasarkan **tempat bertugas**, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada di Daerah memiliki tingkat kesulitan tinggi dan Daerah terpencil

3 Berdasarkan **kondisi kerja**, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.



4 Berdasarkan **kelangkaan profesi**, diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam mengemban tugas memiliki keterampilan khusus dan langka

5 Berdasarkan **prestasi kerja** diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi dan/atau inovasi.

6 Berdasarkan **pertimbangan objektif lainnya**, diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.



## LATAR BELAKANG PENGATURAN TPP dalam PASAL 58 PP Nomor 12 Tahun 2019

1. **Besaran TPP** pada masing-masing pemerintah daerah **sangat bervariasi** dan beberapa pemerintah daerah bahkan memberikan TPP **melampaui Tunjangan Kinerja pada K/L pada Pemerintah**, sehingga tidak sejalan dengan asas **kepatutan, kewajaran dan akuntabilitas**.
2. Selain itu, besaran belanja pegawai **terhadap total belanja APBD cenderung naik**, meskipun **jumlah PNS Daerah cenderung turun**. Kenaikan belanja pegawai tersebut antara lain disebabkan adanya kenaikan tunjangan tambahan penghasilan daerah dari tahun ke tahun.
3. **Perlu adanya regulasi** bagi pemerintah daerah **sebagai pedoman/tata cara** pemberian tambahan penghasilan daerah yang mengatur **batasan, nomenklatur, dan kriteria** pemberian TPP **sebelum ditetapkannya** PP mengenai mengenai **Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Kemahalan dan Fasilitas PNS**, sebagaimana diamanatkan dalam **Pasal 81 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN**.
4. Arah Pengaturan Kebijakan TPP untuk:
  - a. adanya penyatuan kompensasi untuk **take home pay ASN** yang mengarah kepada **single salary dan merit system** sebagai salah satu upaya menuju **reformasi birokrasi yang dikaitkan dengan kinerja pegawai dan capaian reformasi birokrasi dilingkungan Pemda** sebelum ditetapkannya PP mengenai mengenai Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Kemahalan dan Fasilitas PNS;



## LANJUTAN...

- b. adanya suatu regulasi yang menjadi **pedoman bagi pemerintah daerah** dalam menghitung besaran TPP untuk masing-masing **kriteria**, sehingga **besaran alokasi TPP memiliki batas**, tidak hanya didasarkan **pada frasa “disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah”**, pemda tidak memiliki pemahaman bahwa dalam penentuan **besaran pemberian TPP “Sky is The Limit”**;
  - c. adanya **grip** dari pemerintah kepada pemerintah daerah untuk dapat **segera merespon kebijakan-kebijakan strategis pemerintah** (ex: pada tahun 2021 persetujuan TPP menjadi alat kontrol dalam realisasi pemberian insentif tenaga kesehatan daerah, bagi pemda yang belum merealisasikan inakesda maka TPP dibayarkan setelah inakesda dibayarkan).
3. Dalam proses penyusunan RPP mengenai TPP, Kemenkeu dan Kemendagri melakukan **exercise/simulasi formula** yang akan diterapkan oleh pemerintah daerah. Hasil simulasi tersebut menunjukkan bahwa **batas bawah formula pemberian TPP** akan menyebabkan beberapa pemerintah daerah akan **meningkat secara signifikan**, sehingga hal ini membuat kekhawatiran pemda tersebut akan meminta tambahan **Dana Transfer Umum (DAU)** guna mencukupi kebutuhan alokasi pemberian TPP.
4. Rekomendasi:
- a. Melakukan koordinasi dengan K/L terkait (Kemenkeu, BKN dan Menpan RB) untuk segera menyiapkan **substansi pengaturan mengenai TPP ASN Daerah**;
  - b. **Menggabungkan substansi pengaturan TPP ASN Daerah** menjadi **satu pengaturan** dalam RPP mengenai **Gaji, Tunjangan Kinerja, Tunjangan Kemahalan dan Fasilitas PNS**, sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN.



# IMPLEMENTASI PEMBERIAN TPP SESUAI PP NO 12 TAHUN 2019

## TPP TAHUN 2020

**SURAT MENDAGRI NOMOR  
061/14089/SJ TANGGAL  
17 DESEMBER 2019**

**KEPUTUSAN MENDAGRI  
NOMOR 061-5449 TAHUN  
2019**

## TPP TAHUN 2021

**SURAT MENDAGRI NOMOR  
900/5663/SJ TANGGAL 12  
OKTOBER 2020**

**KEPUTUSAN MENDAGRI  
NOMOR 900-4700 TAHUN  
2020**

## TPP TAHUN 2022

**PERMENDAGRI 27  
TAHUN 2021 TTG  
PEDOMAN PENYUSUNAN  
APBD 2022**

**KEPUTUSAN MENDAGRI  
NOMOR 900-4700  
TAHUN 2020**





# PMDN 27/2021

## TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN APBD TA 2022

Lampiran  
C.2.1.a).f)

**Penganggaran TPP ASN memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.**

- Penentuan kriteria pemberian tambahan penghasilan didasarkan pada pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- Pemberian tambahan penghasilan kepada pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada PP.
- Penetapan besaran standar satuan biaya tambahan penghasilan kepada pegawai ASN dimaksud memperhatikan aspek efisiensi, efektivitas, kepatutan dan kewajaran serta rasionalitas.
- Dalam hal belum adanya Perkada, kepala daerah dapat memberikan tambahan penghasilan bagi pegawai ASN setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri setelah mendapatkan pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan.
- Dalam hal Kepala Daerah menetapkan pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai ASN tidak sesuai dengan ketentuan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum atas usulan Mendagri.
- Persetujuan diajukan melalui Dirjen Bina Keuda dengan menggunakan SIPD.

**Persetujuan Diajukan setelah Pemerintah Daerah melakukan Validasi Perhitungan Pemberian Tambahan Penghasilan dengan Memperhatikan Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri terhadap Tambahan Penghasilan ASN di lingkungan Pemda sesuai dengan ketentuan PP**







# AMANAT KEPMENDAGRI 900-4700 TAHUN 2020

Pemerintah Daerah menetapkan pemberian TPP ASN di Lingkungan Pemda dengan PERKADA setelah mendapat persetujuan Menteri







Persetujuan Menteri ditujukan kepada MENTERI DALAM NEGERI melalui DIRJEN BINA KEUANGAN DAERAH

Persetujuan ditindaklanjuti dengan mengidentifikasi kriteria TPP ASN pada setiap jabatan, yg terdiri dari: beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, dan/ pertimbangan objektif lainnya.



# KRITERIA PEMBERIAN TPP ASN PEMDA

## KRITERIA

	Beban Kerja	Prestasi Kerja	Kondisi Kerja	Tempat Bertugas	Kelangkaan Profesi	POL
						
<b>Kepmendagri No. 061-5449 Th. 2019</b>	<b>40%</b>	<b>60%</b>	<b>10%</b>	<b>10%</b>	<b>Min. 10%</b>	
<b>Kepmendagri No. 900-4700 Th. 2020</b>	<b>Sesuai kemampuan daerah</b>	<b>Sesuai kemampuan daerah</b>	<b>Sesuai kemampuan daerah</b>	<b>Max. 10%</b>	<b>Min. 10%</b>	

\*PROSENTASE KRITERIA X BASIC TPP

# KEBIJAKAN PEMBERIAN TPP TA 2022



Alokasi anggaran TPP **sama dengan** tahun anggaran sebelumnya

Alokasi anggaran TPP **dapat melebihi tahun anggaran sebelumnya**, sepanjang:

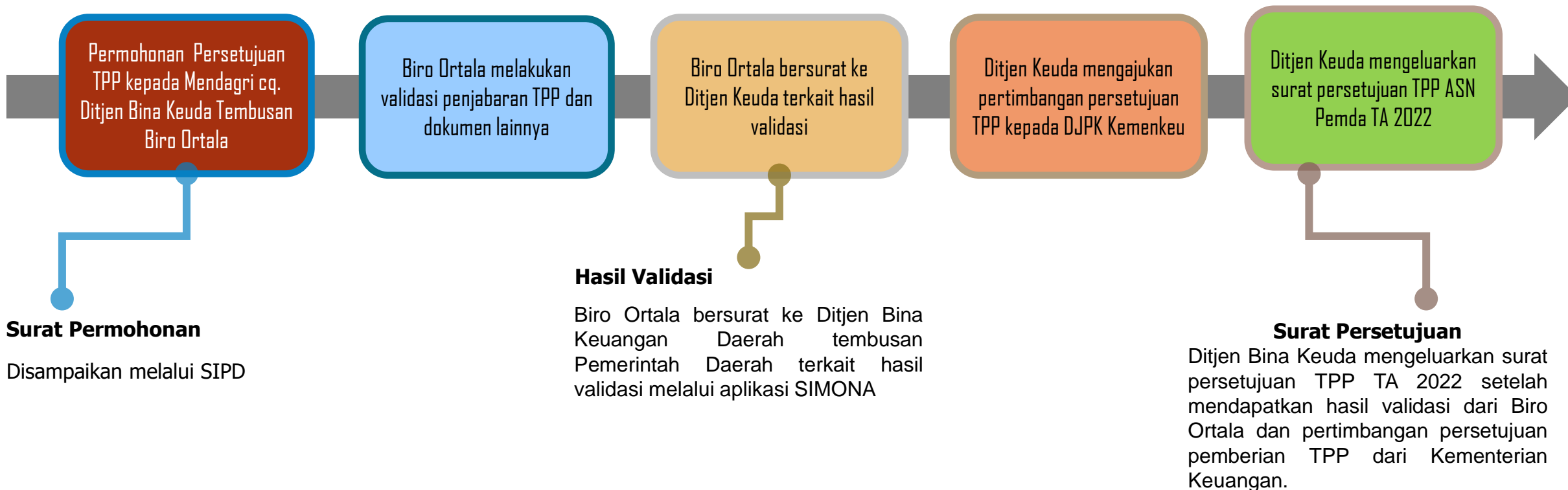
- 1) hasil realokasi anggaran belanja pegawai dalam APBD Tahun Anggaran 2021, antara lain honorarium, uang lembur, dan/atau kompensasi lain dalam peraturan perundang-undangan;
- 2) merupakan pemberian TPP berdasarkan kriteria kondisi kerja kepada perangkat daerah yang terkait langsung dalam upaya pencegahan dan penanganan Covid-19;
- 3) alokasi anggaran TPP yang diberikan kepada pejabat dan pegawai Inspektorat Daerah lebih besar dari perangkat daerah lain dan lebih kecil dari Sekretariat Daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah

Kebijakan pemberian TPP Tahun Anggaran 2022 juga berpedoman pada **program koordinasi dan supervisi KPK:**

- a. Menggunakan hasil evaluasi jabatan yang telah divalidasi;
- b. Mengintegrasikan pembayaran insentif dan honorarium ke dalam formulasi penganggaran TPP;
- c. Pemberian sanksi administratif berupa penundaan pembayaran TPP dalam hal ASN penerima TPP tidak patuh dalam pelaporan LHKPN, memanfaatkan asset secara tidak sah, belum menyelesaikan kerugian negara berdasarkan hasil Audit BPK;
- d. Dalam penyelenggaraan pengadaan barang/jasa agar memprioritaskan pemberian TPP kepada jabatan fungsional dan/atau ASN di UKPBJ mengacu kepada hasil evaluasi jabatan.








# MEKANISME PENGAJUAN PERSETUJUAN PEMBERIAN TPP TA 2022





# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TPP TA 2022

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Sesditjen /Dirjen	Direktur	Kasubdit	Kasi	Staf	Kelengkapan	Waktu Pengerjaan	Output	
1.	Menerima Surat Usulan TPP dari Pemda yang telah divalidasi oleh Biro Ortala beserta kelengkapannya					 SIPD E-Office Disposisi dari Sesditjen Surat Usulan TPP dari Pemda Surat Hasil Validasi dari Biro Ortala	30 Menit	Surat Usulan TPP dari Pemda Surat Hasil Validasi dari Biro Ortala		
2.	Melakukan Konsultasi dengan Ditjen Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan terkait Hasil Validasi  Apabila disetujui maka proses dapat dilanjutkan  Apabila tidak maka Kemenkeu akan menyampaikan surat ketidaksetujuan ke Ditjen Bina Keuda untuk ditindaklanjuti oleh pemda			 Tidak → 		Surat Permohonan Masukan terhadap Hasil Validasi  Surat Usulan TPP dari Pemda  Surat Hasil Validasi dari Biro Ortala	2880 Menit	Surat dari DJPK Kemenkeu terkait Hasil Validasi	Dalam Hari kerja	
3.	Menerima Surat dari Ditjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu terkait persetujuan terhadap hasil validasi					Ya →  Surat dari DJPK Kemenkeu terkait Hasil Validasi	30 Menit	Surat dari DJPK Kemenkeu terkait Hasil Validasi Disposisi Sesditjen ke Direktur		

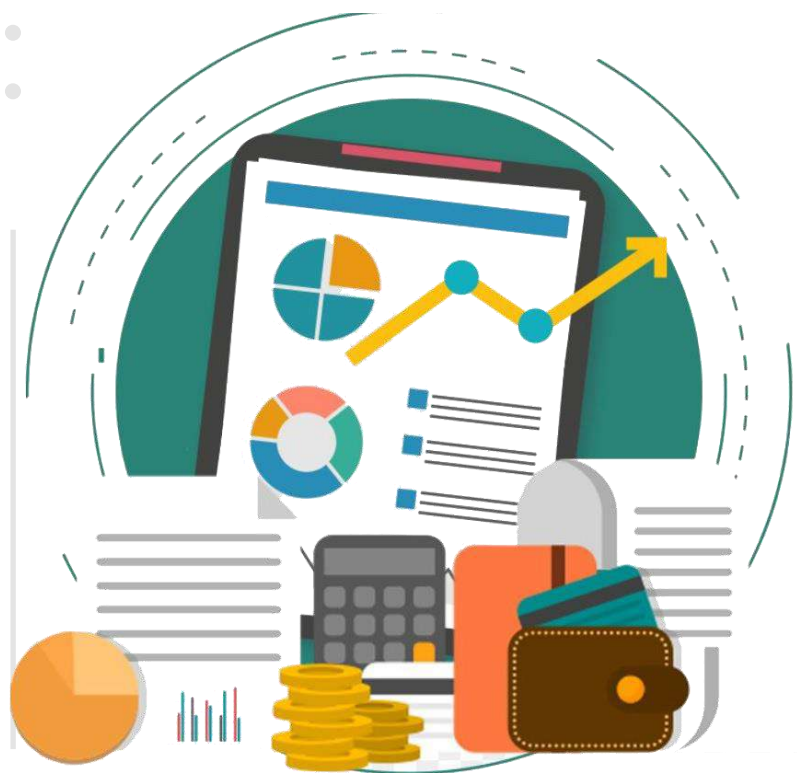


# STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TPP TA 2022

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Sesditjen/Dirjen	Direktur	Kasubdit	Kasi	Staf	Kelengkapan	Waktu Pengerjaan	Output	
4.	Membuat surat Persetujuan Pemberian TPP						Aplikasi e-office Disposisi dari Sesditjen ke Direktur Disposisi dari Direktur Ke Kasubdit Surat dari DJPK Kemenkeu terkait Hasil Validasi Surat Permohonan TPP yang telah diperiksa kesesuaiannya	30 Menit	Konsep Surat Persetujuan Pemberian TPP	
5.	Memberikan Persetujuan terhadap Konsep Surat Persetujuan TPP						Aplikasi e-office Konsep Surat Persetujuan Pemberian TPP	2880 Menit	Konsep Surat Persetujuan Pemberian TPP yang sudah disetujui	Mengacu ke SOP Penandatanganan Surat Keluar oleh Sesditjen
6.	Penandatanganan Surat Persetujuan Pemberian TPP						Aplikasi e-office Konsep Surat Persetujuan Pemberian TPP yang sudah disetujui	10 Menit	Surat Persetujuan Pemberian TPP yang telah ditandatangani	Mengacu ke SOP Penandatanganan Surat Keluar oleh Sesditjen
7.	Mengunggah Surat Persetujuan Pemberian TPP ke dalam SIPD						Surat Persetujuan Pemberian TPP yang telah ditandatangani	30 Menit		



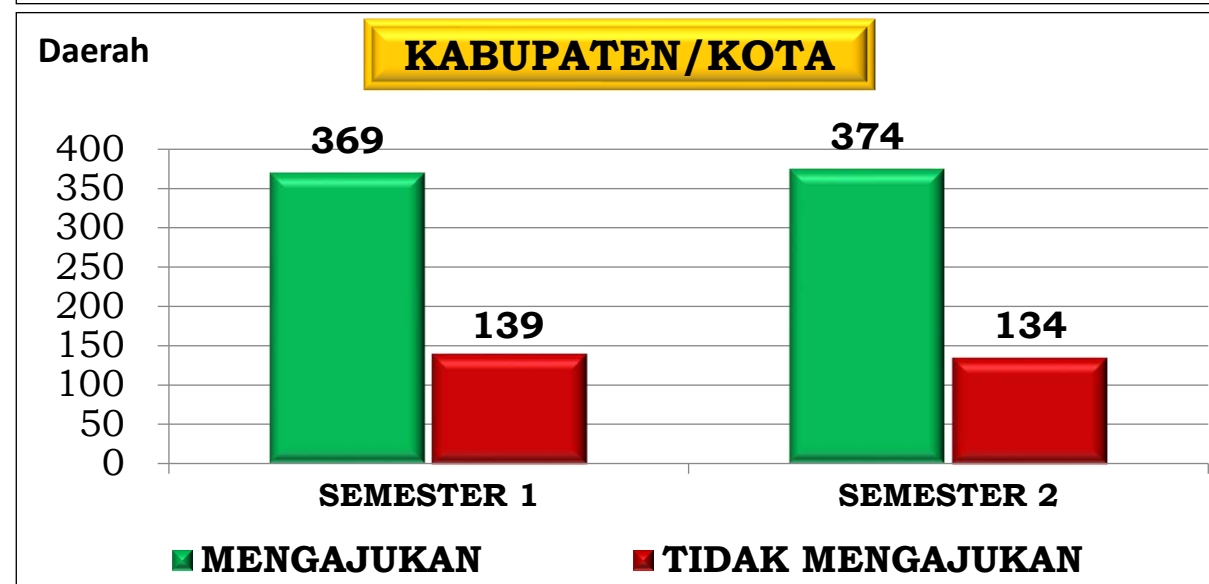
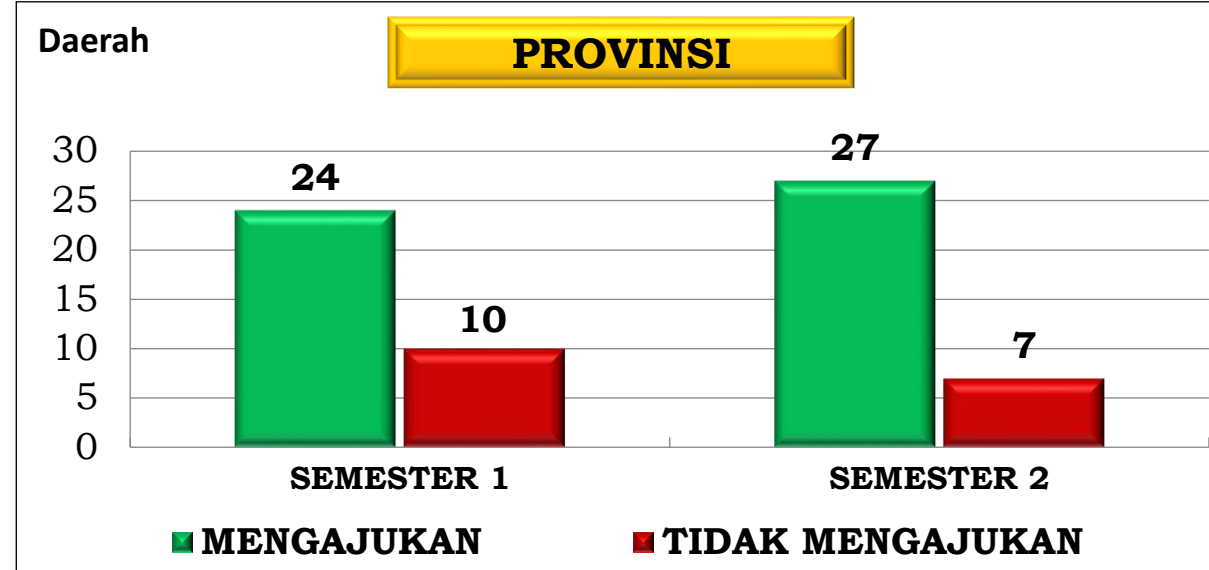
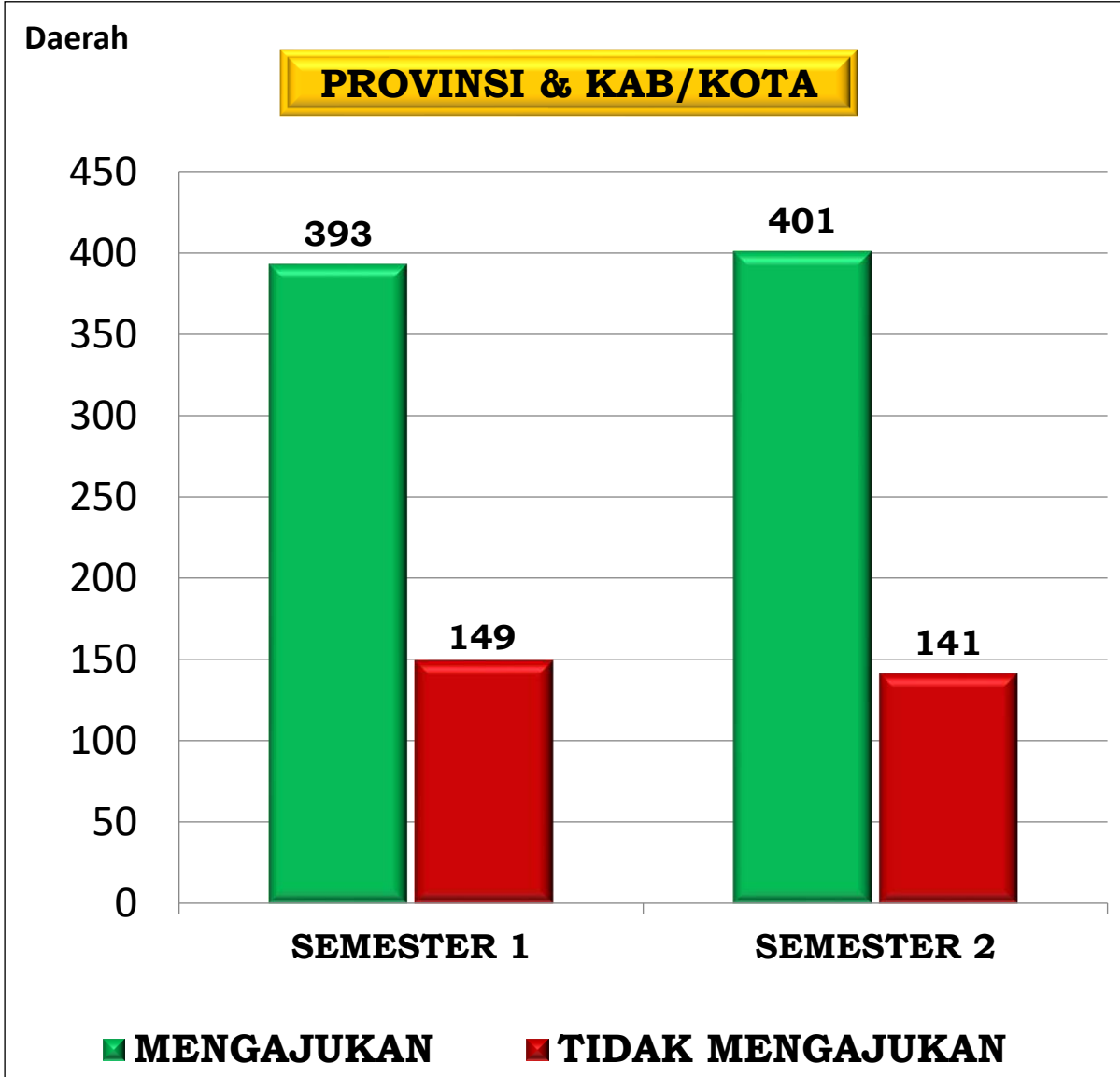




## DATA TPP TAHUN 2021-2022



## JUMLAH PEMDA YANG MENGAJUKAN PERSETUJUAN TPP PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TAHUN 2021



Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 30 Januari 2022, 18.00 WIB.







## NAMA PEMDA YANG BELUM MELAKUKAN PENGAJUAN TPP SEMESTER 1

PROVINSI	
NO	DAERAH
1	Prov. Aceh
2	Prov. Sumatera Selatan
3	Prov. Jawa Tengah
4	Prov. Kalimantan Timur
5	Prov. Sulawesi Barat
6	Prov. Sulawesi Utara
7	Prov. Sulawesi Tenggara
8	Prov. Nusa Tenggara Timur
9	Prov. Maluku
10	Prov. Papua Barat

KOTA	
NO	DAERAH
1	Kota Lhokseumawe
2	Kota Pematang Siantar
3	Kota Lubuk Linggau
4	Kota Palembang
5	Kota Tomohon
6	Kota Pare-Pare
7	Kota Bau-Bau
8	Kota Ambon
9	Kota Jayapura
10	Kota Sorong

KABUPATEN							
NO	DAERAH	NO	DAERAH	NO	DAERAH	NO	DAERAH
1	Kab. Aceh Tenggara	34	Kab. Bondowoso	66	Kab. Toli-Toli	98	Kab. Deiyai
2	Kab. Bener Meriah	35	Kab. Tuban	67	Kab. Toraja Utara	99	Kab. Dogiyai
3	Kab. Bireun	36	Kab. Kayong Utara	68	Kab. Bombana	100	Kab. Jayapura
4	Kab. Gayo Lues	37	Kab. Melawi	69	Kab. Buton	101	Kab. Jayawijaya
5	Kab. Pidie Jaya	38	Kab. Sekadau	70	Kab. Konawe	102	Kab. Keerom
6	Kab. Pidie	39	Kab. Sintang	71	Kab. Konawe Selatan	103	Kab. Kepulauan Yapen
7	Kab. Simeulue	40	Kab. Barito Utara	72	Kab. Konawe Utara	104	Kab. Lanny Jaya
8	Kab. Asahan	41	Kab. Kapuas	73	Kab. Muna	105	Kab. Mamberamo Raya
9	Kab. Deli Serdang	42	Kab. Kotawaringin Timur	74	Kab. Buton Selatan	106	Kab. Mappi
10	Kab. Humbang Hasundutan	43	Kab. Banjar	75	Kab. Muna Barat	107	Kab. Mamberamo Tengah
11	Kab. Labuhanbatu Selatan	44	Kab. Tapin	76	Kab. Belu	108	Kab. Merauke
12	Kab. Labuhanbatu Utara	45	Kab. Kutai Kertanegara	77	Kab. Ende	109	Kab. Mimika
13	Kab. Langkat	46	Kab. Kutai Timur	78	Kab. Lembata	110	Kab. Nabire
14	Kab. Nias Selatan	47	Kab. Mahakam Ulu	79	Kab. Malaka	111	Kab. Nduga
15	Kab. Padang Lawas Utara	48	Kab. Paser	80	Kab. Rote Ndao	112	Kab. Paniai
16	Kab. Simalungun	49	Kab. Penajam Paser Utara	81	Kab. Sikka	113	Kab. Pegunungan Bintang
17	Kab. Tapanuli Tengah	50	Kab. Nunukan	82	Kab. Sumba Barat	114	Kab. Puncak
18	Kab. Kep. Mentawai	51	Kab. Mamuju	83	Kab. Sumba Barat Daya	115	Kab. Puncak Jaya
19	Kab. Kuantan Singingi	52	Kab. Mamuju Tengah	84	Kab. Timor Tengah Utara	116	Kab. Supiori
20	Kab. Bungo	53	Kab. Pasang Kayu	85	Kab. Buru Selatan	117	Kab. Tolikara
21	Kab. Merangin	54	Kab. Bolaang Mongondow	86	Kab. Kep. Aru	118	Kab. Waropen
22	Kab. Muaro Jambi	55	Kab. Bolaang Mongondow Utara	87	Kab. Maluku Barat Daya	119	Kab. Yahukimo
23	Kab. Sarolangun	56	Kab. Kep. Talaud	88	Kab. Maluku Tengah	120	Kab. Yalimo
24	Kab. Tebo	57	Kab. Minahasa Selatan	89	Kab. Maluku Tenggara	121	Kab. Fak-Fak
25	Kab. Musi Rawas Utara	58	Kab. Minahasa Utara	90	Kab. Kep. Tanimbar	122	Kab. Manokwari
26	Kab. Bangka Barat	59	Kab. Siau Tagulandang Biaro	91	Kab. Seram Bagian Barat	123	Kab. Manokwari Selatan
27	Kab. Belitung Timur	60	Kab. Boalemo	92	Kab. Seram Bagian Timur	124	Kab. Maybrat
28	Kab. Pesawaran	61	Kab. Pohuwato	93	Kab. Halmahera Barat	125	Kab. Pegunungan Arfak
29	Kab. Pesisir Barat	62	Kab. Banggai Laut	94	Kab. Halmahera Tengah	126	Kab. Sorong
30	Kab. Tulang Bawang	63	Kab. Donggala	95	Kab. Halmahera Timur	127	Kab. Sorong Selatan
31	Kab. Subang	64	Kab. Morowali Utara	96	Kab. Biak Numfor	128	Kab. Tambrau
32	Kab. Lebak	65	Kab. Sigi	97	Kab. Boven Digoel	129	Kab. Teluk Bintuni
33	Kab. Pandeglang						



## NAMA PEMDA YANG BELUM MELAKUKAN PENGAJUAN TPP SEMESTER 2

### PROVINSI

NO	DAERAH
1	Prov. Sumatera Selatan
2	Prov. DKI Jakarta
3	Prov. Sulawesi Utara
4	Prov. Sulawesi Tenggara
5	Prov. Maluku Utara
6	Prov. Papua
7	Prov. Papua Barat

### KOTA

NO	DAERAH
1	Kota Langsa
2	Kota Banda Aceh
3	Kota Tanjung Balai
4	Kota Tebing Tinggi
5	Kota Lubuk Linggau
6	Kota Bandar Lampung
7	Kota Cilegon
8	Kota Palangkaraya
9	Kota Banjar Baru
10	Kota Balikpapan
11	Kota Pare-Pare
12	Kota Bau-Bau
13	Kota Kendari
14	Kota Jayapura
15	Kota Sorong

### KABUPATEN

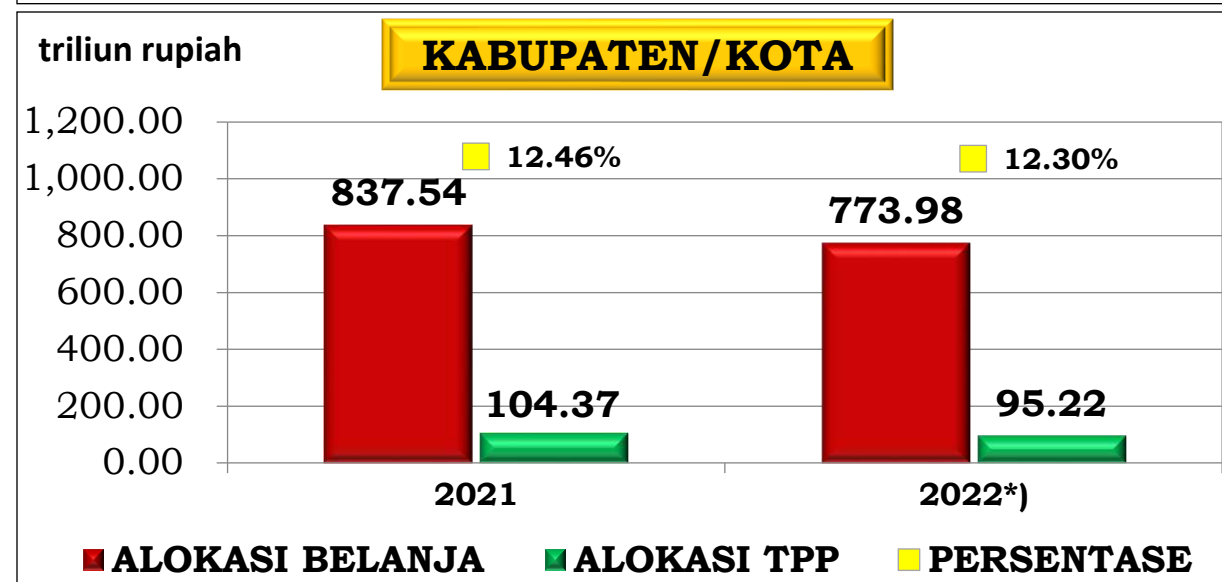
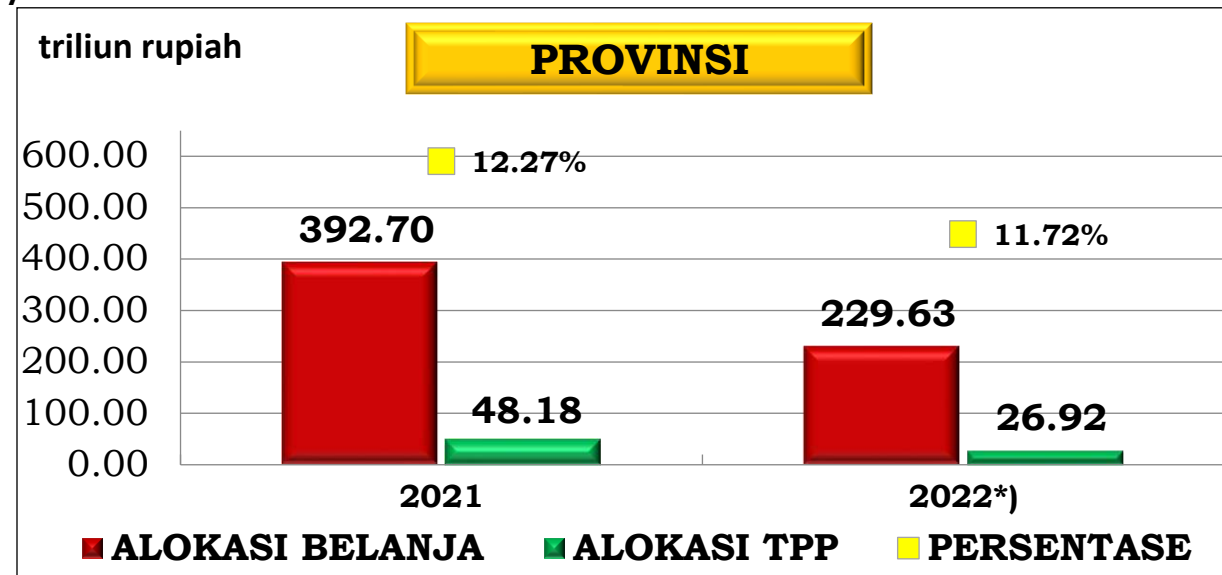
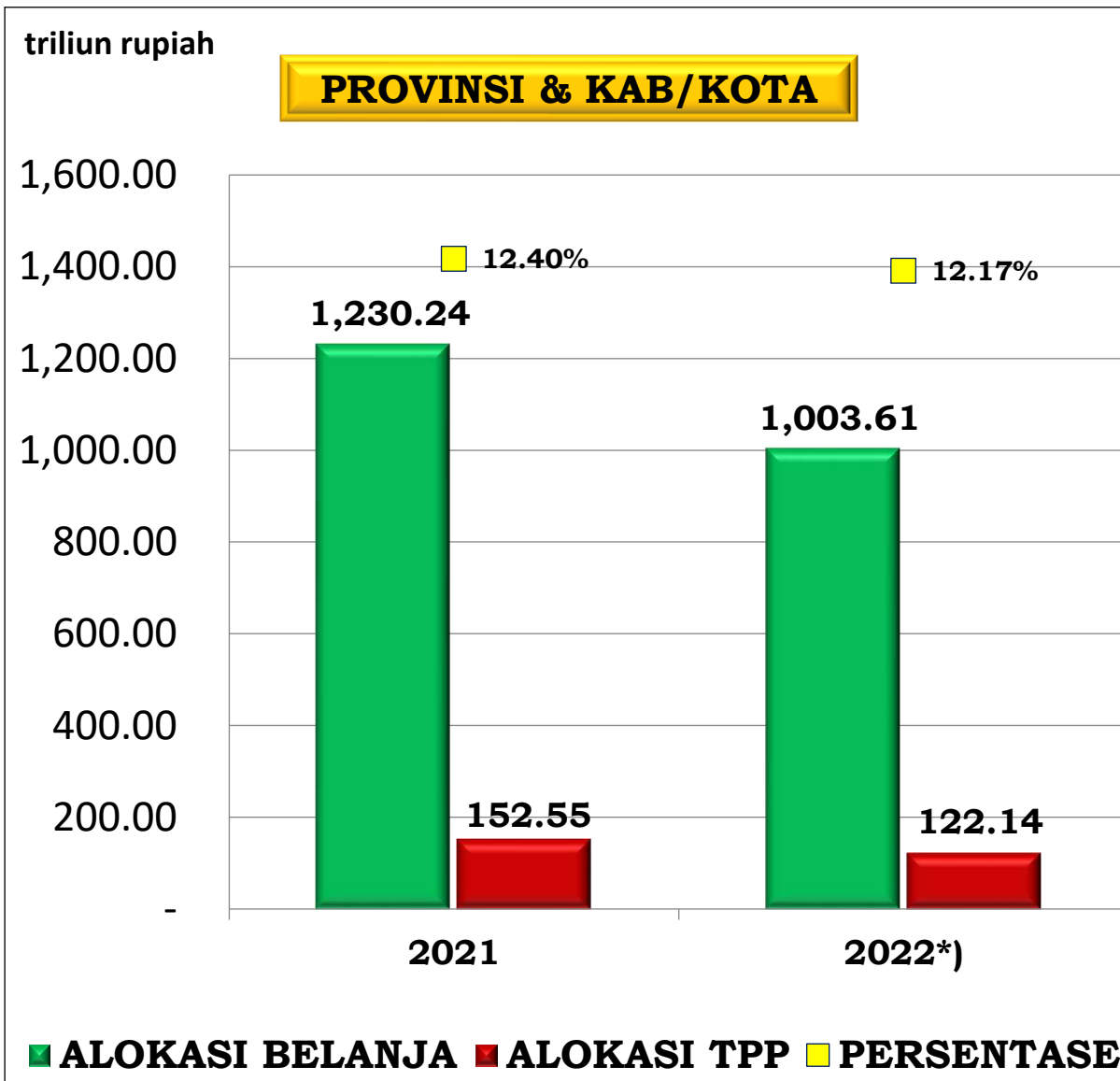
NO	DAERAH	NO	DAERAH	NO	DAERAH	NO	DAERAH
1	Kab. Aceh Singkil	31	Kab. Mamasa	61	Kab. Muna Barat	91	Kab. Jayapura
2	Kab. Aceh Tenggara	32	Kab. Mamuju Tengah	62	Kab. Sumbawa Barat	92	Kab. Keerom
3	Kab. Pidie Jaya	33	Kab. Pasang Kayu	63	Kab. Lombok Tengah	93	Kab. Kepulauan Yapen
4	Kab. Pidie	34	Kab. Bolaang Mongondow	64	Kab. Alor	94	Kab. Lanny Jaya
5	Kab. Nias Selatan	35	Kab. Kep. Talaud	65	Kab. Belu	95	Kab. Mamberamo Raya
6	Kab. Nias Utara	36	Kab. Kep. Sangihe	66	Kab. Manggarai Barat	96	Kab. Mamberamo Tengah
7	Kab. Padang Lawas Utara	37	Kab. Banggai	67	Kab. Nagekeo	97	Kab. Merauke
8	Kab. Pakpak Bharat	38	Kab. Banggai Kepulauan	68	Kab. Sikka	98	Kab. Mimika
9	Kab. Simalungun	39	Kab. Donggala	69	Kab. Sumba Barat	99	Kab. Nabire
10	Kab. Tapanuli Utara	40	Kab. Poso	70	Kab. Sumba Barat Daya	100	Kab. Nduga
11	Kab. Batanghari	41	Kab. Tojo Una-Una	71	Kab. Timor Tengah Utara	101	Kab. Paniai
12	Kab. Kerinci	42	Kab. Enrekang	72	Kab. Buru	102	Kab. Pegunungan Bintang
13	Kab. Muaro Jambi	43	Kab. Luwu Utara	73	Kab. Buru Selatan	103	Kab. Puncak
14	Kab. Tanjung Jabung Timur	44	Kab. Maros	74	Kab. Kep. Aru	104	Kab. Puncak Jaya
15	Kab. Bengkulu Selatan	45	Kab. Pangkep	75	Kab. Maluku Barat Daya	105	Kab. Sarmi
16	Kab. Kaur	46	Kab. Pinrang	76	Kab. Maluku Tengah	106	Kab. Supiori
17	Kab. Lebong	47	Kab. Kepulauan Selayar	77	Kab. Maluku Tenggara	107	Kab. Tolikara
18	Kab. Banyuasin	48	Kab. Sidrap	78	Kab. Kep. Tanimbar	108	Kab. Waropen
19	Kab. Pangandaran	49	Kab. Soppeng	79	Kab. Seram Bagian Barat	109	Kab. Yahukimo
20	Kab. Pamekasan	50	Kab. Takalar	80	Kab. Seram Bagian Timur	110	Kab. Kaimana
21	Kab. Barito Timur	51	Kab. Toraja Utara	81	Kab. Halmahera Barat	111	Kab. Kep. Raja Ampat
22	Kab. Kapuas	52	Kab. Wajo	82	Kab. Halmahera Tengah	112	Kab. Manokwari
23	Kab. Katingan	53	Kab. Bombana	83	Kab. Halmahera Timur	113	Kab. Manokwari Selatan
24	Kab. Pulang Pisau	54	Kab. Buton Utara	84	Kab. Halmahera Utara	114	Kab. Maybrat
25	Kab. Balangan	55	Kab. Konawe	85	Kab. Pulau Morotai	115	Kab. Pegunungan Arfak
26	Kab. Tanah Bumbu	56	Kab. Konawe Selatan	86	Kab. Pulau Taliabu	116	Kab. Sorong
27	Kab. Kutai Kertanegara	57	Kab. Konawe Utara	87	Kab. Asmat	117	Kab. Sorong Selatan
28	Kab. Paser	58	Kab. Muna	88	Kab. Boven Digoel	118	Kab. Teluk Bintuni
29	Kab. Penajam Paser Utara	59	Kab. Buton Selatan	89	Kab. Deiyai	119	Kab. Teluk Wondama
30	Kab. Tana Tidung	60	Kab. Buton Tengah	90	Kab. Dogiyai		





## ALOKASI ANGGARAN TPP

### APBD PROVINSI DAN KABUPATEN/KOTA SE-INDONESIA TA 2021-2022



Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 30 Januari 2022, 18.00 WIB.

\*) Jumlah Pemda pada TA 2022 adalah 483 Prov & Kab/Kota



# TERIMAKASIH



[www.kemendagri.go.id](http://www.kemendagri.go.id)



[Kemendagri\\_RI](https://www.facebook.com/Kemendagri_RI)



[kemendagri](https://twitter.com/kemendagri)



[kemendagri](https://www.instagram.com/kemendagri)



## DATA DUKUNG TPP APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TA 2021-2022

NO	DAERAH	PENGAJUAN TPP 2021		2021			2022		
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
<b>I</b>	<b>Prov. Aceh</b>	<b>TIDAK</b>	<b>YA</b>	<b>16,763.47</b>	<b>1,231.01</b>	<b>7.34%</b>	<b>16,170.65</b>	<b>1,211.89</b>	<b>7.49%</b>
1	Kab. Aceh Barat Daya	YA	YA	1,036.93	87.79	8.47%	1,000.04	77.13	7.71%
2	Kab. Aceh Barat	YA	YA	1,389.99	118.00	8.49%	1,294.52	119.06	9.20%
3	Kab. Aceh Besar	YA	YA	1,993.41	168.04	8.43%	1,910.18	136.78	7.16%
4	Kab. Aceh Jaya	YA	YA	971.20	98.36	10.13%	893.40	74.19	8.30%
5	Kab. Aceh Selatan	YA	YA	1,385.16	128.53	9.28%	1,366.24	127.12	9.30%
6	Kab. Aceh Singkil	YA	TIDAK	942.80	69.97	7.42%	853.90	58.49	6.85%
7	Kab. Aceh Tamiang	YA	YA	1,238.87	133.32	10.76%	1,224.16	118.85	9.71%
8	Kab. Aceh Tengah	YA	YA	1,251.88	111.10	8.87%	1,332.86	103.82	7.79%
9	Kab. Aceh Tenggara	TIDAK	TIDAK	1,398.46	70.51	5.04%	1,288.16	54.52	4.23%
10	Kab. Aceh Timur	YA	YA	1,906.66	153.97	8.08%	1,781.16	135.22	7.59%
11	Kab. Aceh Utara	YA	YA	2,545.49	226.00	8.88%	2,484.15	203.31	8.18%
12	Kab. Bener Meriah	TIDAK	YA	1,041.74	71.45	6.86%	920.79	63.00	6.84%
13	Kab. Bireun	TIDAK	YA	2,043.59	162.32	7.94%	1,907.94	174.16	9.13%
14	Kab. Gayo Lues	TIDAK	YA	901.14	16.61	1.84%	N/A	N/A	N/A
15	Kab. Nagan Raya	YA	YA	1,237.99	108.33	8.75%	1,099.81	102.06	9.28%
16	Kab. Pidie Jaya	TIDAK	TIDAK	979.01	64.14	6.55%	N/A	N/A	N/A
17	Kab. Pidie	TIDAK	TIDAK	2,103.09	142.61	6.78%	2,081.12	135.57	6.51%
18	Kab. Simeulue	TIDAK	YA	886.99	90.88	10.25%	836.04	86.68	10.37%
19	Kota Langsa	YA	TIDAK	942.47	92.73	9.84%	843.83	83.72	9.92%
20	Kota Banda Aceh	YA	TIDAK	1,318.21	145.85	11.06%	1,378.97	159.21	11.55%
21	Kota Lhokseumawe	TIDAK	YA	833.76	73.52	8.82%	818.65	70.40	8.60%
22	Kota Sabang	YA	YA	771.92	91.24	11.82%	765.59	91.53	11.96%
23	Kota Subulussalam	YA	YA	700.21	34.58	4.94%	734.71	38.19	5.20%

Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 30 Januari 2022, 18.00 WIB.







## DATA DUKUNG TPP APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TA 2021-2022

NO	DAERAH	PENGAJUAN TPP 2021		2021			2022		
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
<b>2</b>	<b>Prov. Sumatera Utara</b>	<b>YA</b>	<b>YA</b>	<b>13,749.50</b>	<b>1,613.12</b>	<b>11.73%</b>	<b>12,649.63</b>	<b>1,451.72</b>	<b>11.48%</b>
1	Kab. Asahan	TIDAK	YA	1,613.95	206.77	12.81%	1,644.55	201.12	12.23%
2	Kab. Batubara	YA	YA	1,217.66	148.00	12.15%	1,281.49	133.20	10.39%
3	Kab. Dairi	YA	YA	1,208.25	137.91	11.41%	1,181.75	130.26	11.02%
4	Kab. Deli Serdang	TIDAK	YA	4,026.68	491.83	12.21%	4,229.54	525.02	12.41%
5	Kab. Humbang Hasundutan	TIDAK	YA	1,095.47	128.99	11.77%	1,039.56	122.44	11.78%
6	Kab. Karo	YA	YA	1,363.56	207.10	15.19%	1,344.36	185.70	13.81%
7	Kab. Labuhanbatu	YA	YA	1,352.72	192.74	14.25%	1,372.70	173.58	12.65%
8	Kab. Labuhanbatu Selatan	TIDAK	YA	1,024.12	129.36	12.63%	918.82	105.78	11.51%
9	Kab. Labuhanbatu Utara	TIDAK	YA	1,025.27	153.06	14.93%	963.19	139.86	14.52%
10	Kab. Langkat	TIDAK	YA	1,821.27	156.55	8.60%	1,901.97	367.09	19.30%
11	Kab. Mandailing Natal	YA	YA	1,673.14	204.59	12.23%	1,602.46	211.18	13.18%
12	Kab. Nias	YA	YA	785.11	123.92	15.78%	943.00	87.99	9.33%
13	Kab. Nias Barat	YA	YA	668.74	51.06	7.64%	756.31	76.17	10.07%
14	Kab. Nias Selatan	TIDAK	TIDAK	1,618.15	128.90	7.97%	1,481.39	121.64	8.21%
15	Kab. Nias Utara	YA	TIDAK	894.25	106.00	11.85%	889.49	94.56	10.63%
16	Kab. Padang Lawas	YA	YA	1,135.95	100.86	8.88%	N/A	N/A	N/A
17	Kab. Padang Lawas Utara	TIDAK	TIDAK	1,519.10	108.43	7.14%	1,318.20	93.39	7.08%
18	Kab. Pakpak Bharat	YA	TIDAK	556.43	58.76	10.56%	536.12	56.86	10.61%
19	Kab. Samosir	YA	YA	931.70	109.22	11.72%	852.83	87.92	10.31%
20	Kab. Simalungun	TIDAK	TIDAK	2,252.49	295.34	13.11%	2,399.37	322.32	13.43%
21	Kab. Tapanuli Selatan	YA	YA	1,338.24	133.77	10.00%	1,433.19	131.33	9.16%
22	Kab. Tapanuli Tengah	TIDAK	YA	1,176.91	147.71	12.55%	1,152.85	115.68	10.03%
23	Kab. Tapanuli Utara	YA	TIDAK	1,507.99	208.24	13.81%	1,369.87	176.01	12.85%
24	Kab. Toba Samosir	YA	YA	1,112.11	156.00	14.03%	1,124.69	147.54	13.12%
25	Kab. Serdang Bedagai	YA	YA	1,487.56	108.49	7.29%	1,557.62	217.98	13.99%
26	Kota Binjai	YA	YA	1,023.54	158.86	15.52%	1,011.34	147.82	14.62%
27	Kota Gunung Sitoli	YA	YA	732.35	82.88	11.32%	716.86	63.80	8.90%
28	Kota Medan	YA	YA	5,346.47	861.02	16.10%	6,722.20	758.91	11.29%
29	Kota Padang Sidempuan	YA	YA	892.94	107.66	12.06%	878.00	106.01	12.07%
30	Kota Pematang Siantar	TIDAK	YA	920.35	78.78	8.56%	999.03	138.75	13.89%
31	Kota Sibolga	YA	YA	604.10	73.71	12.20%	764.92	85.80	11.22%
32	Kota Tanjung Balai	YA	TIDAK	766.40	137.32	17.92%	619.87	113.41	18.30%
33	Kota Tebing Tinggi	YA	TIDAK	776.30	86.64	11.16%	726.73	90.37	12.44%

Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 30 Januari 2022, 18.00 WIB.





## DATA DUKUNG TPP APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TA 2021-2022

NO	DAERAH	PENGAJUAN TPP 2021		2021			2022		
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
<b>3</b>	<b>Prov. Sumatera Barat</b>	<b>YA</b>	<b>YA</b>	<b>6,780.12</b>	<b>805.01</b>	<b>11.87%</b>	<b>6,204.28</b>	<b>772.78</b>	<b>12.46%</b>
1	Kab. Agam	YA	YA	1,523.02	257.07	16.88%	1,499.04	223.74	14.93%
2	Kab. Dharmasraya	YA	YA	1,038.48	177.18	17.06%	933.92	101.57	10.88%
3	Kab. Kep. Mentawai	TIDAK	YA	939.30	125.40	13.35%	884.61	106.26	12.01%
4	Kab. Lima Puluh Kota	YA	YA	1,354.72	220.15	16.25%	1,323.95	196.86	14.87%
5	Kab. Padang Pariaman	YA	YA	1,490.33	284.75	19.11%	1,405.80	251.61	17.90%
6	Kab. Pasaman	YA	YA	1,125.49	194.27	17.26%	1,081.92	149.00	13.77%
7	Kab. Pasaman Barat	YA	YA	1,252.37	174.31	13.92%	1,163.00	162.99	14.01%
8	Kab. Pesisir Selatan	YA	YA	1,729.90	248.36	14.36%	1,659.32	227.23	13.69%
9	Kab. Sijunjung	YA	YA	1,036.25	136.93	13.21%	1,064.87	123.19	11.57%
10	Kab. Solok	YA	YA	1,286.73	233.89	18.18%	1,248.29	217.96	17.46%
11	Kab. Solok Selatan	YA	YA	864.14	131.78	15.25%	931.90	133.89	14.37%
12	Kab. Tanah Datar	YA	YA	1,348.80	218.80	16.22%	1,212.13	188.59	15.56%
13	Kota Bukit Tinggi	YA	YA	785.38	135.60	17.27%	842.48	118.50	14.07%
14	Kota Padang	YA	YA	2,649.63	476.11	17.97%	2,786.63	462.28	16.59%
15	Kota Padang Panjang	YA	YA	609.30	126.13	20.70%	599.88	108.53	18.09%
16	Kota Pariaman	YA	YA	671.46	97.96	14.59%	646.93	100.65	15.56%
17	Kota Payakumbuh	YA	YA	731.04	113.92	15.58%	747.50	109.74	14.68%
18	Kota Sawahlunto	YA	YA	645.67	75.39	11.68%	674.25	84.26	12.50%
19	Kota Solok	YA	YA	636.69	110.36	17.33%	733.54	118.23	16.12%

Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 30 Januari 2022, 18.00 WIB.





## DATA DUKUNG TPP APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TA 2021-2022

NO	DAERAH	PENGAJUAN TPP 2021		2021			2022		
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
<b>4</b>	<b>Prov. Riau</b>	<b>YA</b>	<b>YA</b>	<b>9,132.75</b>	<b>1,097.45</b>	<b>12.02%</b>	<b>8,656.85</b>	<b>1,156.52</b>	<b>13.36%</b>
1	Kab. Bengkalis	YA	YA	3,224.26	512.14	15.88%	3,989.96	493.18	12.36%
2	Kab. Indragiri Hilir	YA	YA	2,006.06	297.27	14.82%	1,972.92	284.16	14.40%
3	Kab. Indragiri Hulu	YA	YA	1,476.67	201.67	13.66%	1,423.79	204.91	14.39%
4	Kab. Kampar	YA	YA	2,404.99	389.72	16.20%	2,468.43	340.09	13.78%
5	Kab. Kep. Meranti	YA	YA	1,179.86	168.08	14.25%	1,410.62	177.10	12.56%
6	Kab. Kuantan Singingi	TIDAK	YA	1,276.32	213.37	16.72%	1,329.03	190.36	14.32%
7	Kab. Pelalawan	YA	YA	1,442.70	152.89	10.60%	1,624.62	167.98	10.34%
8	Kab. Rokan Hilir	YA	YA	1,875.71	298.09	15.89%	2,090.66	260.38	12.45%
9	Kab. Rokan Hulu	YA	YA	1,296.21	127.05	9.80%	1,291.14	196.27	15.20%
10	Kab. Siak	YA	YA	2,033.23	321.13	15.79%	2,256.02	361.38	16.02%
11	Kota Dumai	YA	YA	1,246.34	198.35	15.91%	1,279.60	226.13	17.67%
12	Kota Pekanbaru	YA	YA	2,590.33	389.73	15.05%	2,552.26	345.84	13.55%
<b>5</b>	<b>Prov. Kepulauan Riau</b>	<b>YA</b>	<b>YA</b>	<b>3,986.94</b>	<b>488.12</b>	<b>12.24%</b>	<b>3,870.32</b>	<b>635.30</b>	<b>16.41%</b>
1	Kab. Bintan	YA	YA	1,217.75	266.91	21.92%	1,298.29	268.86	20.71%
2	Kab. Karimun	YA	YA	1,297.81	194.38	14.98%	N/A	N/A	N/A
3	Kab. Kep. Anambas	YA	YA	1,170.02	215.50	18.42%	930.14	195.23	20.99%
4	Kab. Lingga	YA	YA	928.58	120.26	12.95%	853.50	119.82	14.04%
5	Kab. Natuna	YA	YA	1,096.64	185.00	16.87%	1,035.20	157.53	15.22%
6	Kota Batam	YA	YA	2,968.57	601.06	20.25%	3,218.49	616.18	19.15%
7	Kota Tanjung Pinang	YA	YA	994.23	176.07	17.71%	972.73	181.60	18.67%

Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 30 Januari 2022, 18.00 WIB.







## DATA DUKUNG TPP APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TA 2021-2022

NO	DAERAH	PENGAJUAN TPP 2021		2021			2022		
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
<b>6</b>	<b>Prov. Jambi</b>	<b>YA</b>	<b>YA</b>	<b>4,516.15</b>	<b>806.78</b>	<b>17.86%</b>	<b>4,795.85</b>	<b>648.52</b>	<b>13.52%</b>
1	Kab. Batanghari	YA	TIDAK	1,322.66	156.10	11.80%	N/A	N/A	N/A
2	Kab. Bungo	TIDAK	YA	1,513.27	165.98	10.97%	1,073.93	82.40	7.67%
3	Kab. Kerinci	YA	TIDAK	1,226.59	136.01	11.09%	1,116.57	124.10	11.11%
4	Kab. Merangin	TIDAK	YA	1,509.16	172.53	11.43%	1,281.49	156.53	12.22%
5	Kab. Muaro Jambi	TIDAK	TIDAK	1,392.25	150.95	10.84%	1,377.85	168.28	12.21%
6	Kab. Sarolangun	TIDAK	YA	1,215.96	116.16	9.55%	1,215.18	141.38	11.63%
7	Kab. Tanjung Jabung Barat	YA	YA	1,228.35	180.96	14.73%	1,361.97	178.22	13.09%
8	Kab. Tanjung Jabung Timur	YA	TIDAK	1,155.21	152.09	13.17%	1,166.69	148.32	12.71%
9	Kab. Tebo	TIDAK	YA	1,103.68	142.65	12.92%	1,143.20	139.27	12.18%
10	Kota Jambi	YA	YA	2,073.29	262.50	12.66%	1,773.75	240.33	13.55%
11	Kota Sungai Penuh	YA	YA	812.84	109.82	13.51%	797.78	109.75	13.76%
<b>7</b>	<b>Prov. Bengkulu</b>	<b>YA</b>	<b>YA</b>	<b>3,052.19</b>	<b>454.77</b>	<b>14.90%</b>	<b>2,838.78</b>	<b>415.72</b>	<b>14.64%</b>
1	Kab. Bengkulu Selatan	YA	TIDAK	979.32	117.39	11.99%	941.49	104.26	11.07%
2	Kab. Bengkulu Tengah	YA	YA	830.03	96.74	11.66%	809.27	95.94	11.86%
3	Kab. Bengkulu Utara	YA	YA	1,271.37	128.58	10.11%	1,174.71	122.94	10.47%
4	Kab. Kaur	YA	TIDAK	908.01	82.70	9.11%	824.46	78.89	9.57%
5	Kab. Kepahiang	YA	YA	782.80	79.72	10.18%	772.32	76.77	9.94%
6	Kab. Lebong	YA	TIDAK	698.41	57.59	8.25%	665.97	70.60	10.60%
7	Kab. Muko-Muko	YA	YA	922.36	106.23	11.52%	883.76	97.47	11.03%
8	Kab. Rejang Lebong	YA	YA	1,041.68	141.96	13.63%	984.86	123.09	12.50%
9	Kab. Seluma	YA	YA	983.81	107.12	10.89%	948.67	114.05	12.02%
10	Kota Bengkulu	YA	YA	1,116.38	210.61	18.87%	1,118.06	189.50	16.95%

Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 30 Januari 2022, 18.00 WIB.





## DATA DUKUNG TPP APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TA 2021-2022

NO	DAERAH	PENGAJUAN TPP 2021		2021			2022		
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
<b>8</b>	<b>Prov. Sumatera Selatan</b>	<b>TIDAK</b>	<b>TIDAK</b>	<b>10,729.10</b>	<b>872.99</b>	<b>8.14%</b>	<b>9,766.47</b>	<b>906.92</b>	<b>9.29%</b>
1	Kab. Banyuasin	YA	TIDAK	2,695.89	248.85	9.23%	2,090.37	236.81	11.33%
2	Kab. Empat Lawang	YA	YA	1,169.09	62.94	5.38%	1,057.67	61.90	5.85%
3	Kab. Lahat	YA	YA	1,979.92	167.57	8.46%	2,000.46	147.05	7.35%
4	Kab. Muara Enim	YA	YA	2,491.42	345.58	13.87%	2,668.34	333.17	12.49%
5	Kab. Musi Banyu Asin	YA	YA	3,054.14	231.69	7.59%	2,974.42	297.09	9.99%
6	Kab. Musi Rawas	YA	YA	1,832.42	158.04	8.62%	1,700.39	154.19	9.07%
7	Kab. Musi Rawas Utara	TIDAK	YA	1,061.18	57.17	5.39%	899.11	71.51	7.95%
8	Kab. Ogan Ilir	YA	YA	1,467.87	176.28	12.01%	1,515.04	174.85	11.54%
9	Kab. OKI	YA	YA	2,705.50	135.35	5.00%	2,605.22	258.59	9.93%
10	Kab. OKU	YA	YA	1,430.68	151.44	10.58%	1,389.23	114.13	8.22%
11	Kab. OKU Selatan	YA	YA	1,321.89	105.26	7.96%	1,407.22	105.78	7.52%
12	Kab. OKU Timur	YA	YA	1,691.70	166.00	9.81%	1,699.44	166.35	9.79%
13	Kab. Penukal Abab Lematang Ilir	YA	YA	1,247.69	112.70	9.03%	1,561.84	113.34	7.26%
14	Kota Lubuk Linggau	TIDAK	TIDAK	1,158.89	94.36	8.14%	906.86	65.54	7.23%
15	Kota Pagar Alam	YA	YA	711.54	68.15	9.58%	756.68	73.86	9.76%
16	Kota Palembang	TIDAK	YA	4,329.49	753.06	17.39%	3,817.56	522.07	13.68%
17	Kota Prabumulih	YA	YA	913.53	106.47	11.65%	887.13	113.02	12.74%

Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 30 Januari 2022, 18.00 WIB.





## DATA DUKUNG TPP APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TA 2021-2022

NO	DAERAH	PENGAJUAN TPP 2021		2021			2022		
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
<b>9</b>	<b>Prov. Bangka Belitung</b>	<b>YA</b>	<b>YA</b>	<b>3,108.63</b>	<b>441.56</b>	<b>14.20%</b>	<b>2,079.66</b>	<b>346.29</b>	<b>16.65%</b>
1	Kab. Bangka	YA	YA	1,281.10	158.19	12.35%	1,270.24	155.14	12.21%
2	Kab. Bangka Barat	TIDAK	YA	875.34	143.37	16.38%	1,039.92	138.11	13.28%
3	Kab. Bangka Selatan	YA	YA	789.01	119.57	15.15%	912.45	116.38	12.75%
4	Kab. Bangka Tengah	YA	YA	940.67	140.39	14.92%	923.74	148.81	16.11%
5	Kab. Belitung	YA	YA	1,101.10	182.85	16.61%	1,079.48	191.50	17.74%
6	Kab. Belitung Timur	TIDAK	YA	967.36	149.35	15.44%	901.08	159.01	17.65%
7	Kota Pangkalpinang	YA	YA	935.09	144.47	15.45%	913.64	153.89	16.84%
<b>10</b>	<b>Prov. Lampung</b>	<b>YA</b>	<b>YA</b>	<b>7,480.93</b>	<b>722.54</b>	<b>9.66%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
1	Kab. Lampung Barat	YA	YA	1,064.44	125.54	11.79%	1,112.54	114.69	10.31%
2	Kab. Lampung Selatan	YA	YA	2,191.71	290.81	13.27%	2,220.79	272.18	12.26%
3	Kab. Lampung Tengah	YA	YA	2,647.16	356.11	13.45%	2,742.72	346.73	12.64%
4	Kab. Lampung Timur	YA	YA	2,595.82	326.98	12.60%	2,368.16	269.87	11.40%
5	Kab. Lampung Utara	YA	YA	1,740.08	210.53	12.10%	1,835.67	205.89	11.22%
6	Kab. Mesuji	YA	YA	900.48	92.18	10.24%	951.27	95.00	9.99%
7	Kab. Pesawaran	TIDAK	YA	1,325.27	171.55	12.94%	1,457.59	155.77	10.69%
8	Kab. Pesisir Barat	TIDAK	YA	920.87	75.27	8.17%	888.53	68.24	7.68%
9	Kab. Pringsewu	YA	YA	1,358.97	185.86	13.68%	1,277.23	165.33	12.94%
10	Kab. Tanggamus	YA	YA	1,995.77	216.32	10.84%	1,930.20	219.32	11.36%
11	Kab. Tulang Bawang	TIDAK	YA	1,245.64	164.33	13.19%	1,358.33	165.81	12.21%
12	Kab. Tulang Bawang Barat	YA	YA	884.97	97.90	11.06%	N/A	N/A	N/A
13	Kab. Way Kanan	YA	YA	1,273.94	152.00	11.93%	1,350.55	149.49	11.07%
14	Kota Bandar Lampung	YA	TIDAK	2,409.65	299.40	12.43%	N/A	N/A	N/A
15	Kota Metro	YA	YA	958.83	94.64	9.87%	874.46	81.82	9.36%

Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 30 Januari 2022, 18.00 WIB.





## DATA DUKUNG TPP APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TA 2021-2022

NO	DAERAH	PENGAJUAN TPP 2021		2021			2022		
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
11	Prov. DKI Jakarta	YA	TIDAK	72,967.01	14,909.53	20.43%	0.00	0.00	0.00%
12	Prov. Jawa Barat	YA	YA	44,615.07	4,345.01	9.74%	31,525.70	3,453.11	10.95%
1	Kab. Bandung	YA	YA	4,627.88	597.30	12.91%	4,885.60	510.07	10.44%
2	Kab. Bandung Barat	YA	YA	3,178.21	604.00	19.00%	3,128.13	465.03	14.87%
3	Kab. Bekasi	YA	YA	6,698.23	1,288.87	19.24%	6,467.18	1,259.39	19.47%
4	Kab. Bogor	YA	YA	7,689.68	1,085.29	14.11%	8,367.50	1,061.09	12.68%
5	Kab. Ciamis	YA	YA	2,384.00	393.56	16.51%	2,739.62	358.37	13.08%
6	Kab. Cianjur	YA	YA	3,013.51	202.84	6.73%	4,248.67	504.13	11.87%
7	Kab. Cirebon	YA	YA	3,511.75	770.47	21.94%	3,423.90	657.52	19.20%
8	Kab. Garut	YA	YA	4,441.97	552.70	12.44%	4,418.87	523.63	11.85%
9	Kab. Indramayu	YA	YA	3,485.00	430.20	12.34%	N/A	N/A	N/A
10	Kab. Karawang	YA	YA	4,564.22	771.04	16.89%	4,848.99	767.27	15.82%
11	Kab. Kuningan	YA	YA	2,542.70	378.64	14.89%	2,662.91	380.72	14.30%
12	Kab. Majalengka	YA	YA	3,555.27	374.15	10.52%	4,018.87	391.80	9.75%
13	Kab. Pangandaran	YA	TIDAK	1,473.09	84.26	5.72%	1,282.07	157.83	12.31%
14	Kab. Purwakarta	YA	YA	2,394.03	397.90	16.62%	2,423.94	397.65	16.41%
15	Kab. Subang	TIDAK	YA	3,063.96	489.01	15.96%	3,036.39	497.50	16.38%
16	Kab. Sukabumi	YA	YA	3,983.99	538.88	13.53%	N/A	N/A	N/A
17	Kab. Sumedang	YA	YA	2,165.23	228.91	10.57%	2,761.10	471.66	17.08%
18	Kab. Tasikmalaya	YA	YA	3,300.11	487.30	14.77%	3,221.85	455.48	14.14%
19	Kota Bandung	YA	YA	6,555.76	1,262.40	19.26%	6,718.79	1,347.76	20.06%
20	Kota Banjar	YA	YA	792.68	132.07	16.66%	759.58	125.45	16.52%
21	Kota Bekasi	YA	YA	6,113.95	1,205.36	19.71%	5,574.69	1,177.34	21.12%
22	Kota Bogor	YA	YA	2,541.73	499.22	19.64%	2,521.67	498.88	19.78%
23	Kota Cimahi	YA	YA	1,524.59	277.00	18.17%	1,480.82	282.55	19.08%
24	Kota Cirebon	YA	YA	1,449.84	245.78	16.95%	1,444.80	254.41	17.61%
25	Kota Depok	YA	YA	3,568.70	518.19	14.52%	3,513.63	453.61	12.91%
26	Kota Sukabumi	YA	YA	1,240.18	215.27	17.36%	1,205.07	207.19	17.19%
27	Kota Tasikmalaya	YA	YA	1,686.23	307.94	18.26%	1,653.68	292.85	17.71%

Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 30 Januari 2022, 18.00 WIB.





## DATA DUKUNG TPP APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TA 2021-2022

NO	DAERAH	PENGAJUAN TPP 2021		2021			2022		
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
<b>13</b>	<b>Prov. Banten</b>	<b>YA</b>	<b>YA</b>	<b>15,948.25</b>	<b>1,117.36</b>	<b>7.01%</b>	<b>11,223.18</b>	<b>1,295.02</b>	<b>11.54%</b>
1	Kab. Lebak	TIDAK	YA	2,712.51	372.61	13.74%	2,745.99	367.10	13.37%
2	Kab. Pandeglang	TIDAK	YA	2,606.95	449.31	17.23%	2,629.52	448.73	17.07%
3	Kab. Serang	YA	YA	3,058.29	567.61	18.56%	3,269.13	622.37	19.04%
4	Kab. Tangerang	YA	YA	5,794.96	918.54	15.85%	6,010.49	906.56	15.08%
5	Kota Cilegon	YA	TIDAK	2,015.42	421.27	20.90%	2,221.67	422.32	19.01%
6	Kota Serang	YA	YA	1,180.80	178.88	15.15%	1,463.79	276.77	18.91%
7	Kota Tangerang	YA	YA	4,575.18	865.86	18.93%	4,965.26	928.11	18.69%
8	Kota Tangerang Selatan	YA	YA	3,245.14	468.65	14.44%	3,484.55	498.98	14.32%
<b>15</b>	<b>Prov. D.I. Yogyakarta</b>	<b>YA</b>	<b>YA</b>	<b>6,091.57</b>	<b>662.17</b>	<b>10.87%</b>	<b>5,761.35</b>	<b>739.60</b>	<b>12.84%</b>
1	Kab. Bantul	YA	YA	2,345.03	270.87	11.55%	2,247.41	269.79	12.00%
2	Kab. Gunung Kidul	YA	YA	2,056.09	263.40	12.81%	2,031.94	260.48	12.82%
3	Kab. Kulon Progo	YA	YA	1,543.63	184.75	11.97%	1,214.55	96.07	7.91%
4	Kab. Sleman	YA	YA	2,883.15	380.10	13.18%	3,043.57	397.40	13.06%
5	Kota Yogyakarta	YA	YA	1,773.33	266.82	15.05%	1,794.43	293.38	16.35%
<b>28</b>	<b>Prov. Bali</b>	<b>YA</b>	<b>YA</b>	<b>8,537.89</b>	<b>933.46</b>	<b>10.93%</b>	<b>6,102.49</b>	<b>843.76</b>	<b>13.83%</b>
1	Kab. Badung	YA	YA	3,800.97	854.35	22.48%	3,252.66	517.08	15.90%
2	Kab. Bangli	YA	YA	1,152.72	199.18	17.28%	1,256.24	135.33	10.77%
3	Kab. Buleleng	YA	YA	2,351.36	318.27	13.54%	2,128.59	322.61	15.16%
4	Kab. Gianyar	YA	YA	2,653.11	244.53	9.22%	2,309.19	186.27	8.07%
5	Kab. Jembrana	YA	YA	1,097.44	148.19	13.50%	1,108.78	137.95	12.44%
6	Kab. Karang Asem	YA	YA	1,645.99	261.42	15.88%	1,592.78	252.56	15.86%
7	Kab. Klungkung	YA	YA	1,540.54	201.06	13.05%	1,327.43	174.33	13.13%
8	Kab. Tabanan	YA	YA	1,954.75	284.91	14.58%	1,832.02	277.40	15.14%
9	Kota Denpasar	YA	YA	1,961.33	402.66	20.53%	2,255.95	413.96	18.35%

Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 30 Januari 2022, 18.00 WIB.





## DATA DUKUNG TPP APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TA 2021-2022

NO	DAERAH	PENGAJUAN TPP 2021		2021			2022		
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
14	Prov. Jawa Tengah	TIDAK	YA	27,190.83	2,971.91	10.93%	N/A	N/A	N/A
1	Kab. Banjarnegara	YA	YA	2,177.80	273.23	12.55%	2,187.09	260.21	11.90%
2	Kab. Banyumas	YA	YA	3,891.81	508.68	13.07%	3,609.76	437.82	12.13%
3	Kab. Batang	YA	YA	1,871.77	220.49	11.78%	1,829.30	207.80	11.36%
4	Kab. Blora	YA	YA	2,198.12	274.05	12.47%	2,299.65	238.56	10.37%
5	Kab. Boyolali	YA	YA	2,282.49	296.31	12.98%	N/A	N/A	N/A
6	Kab. Brebes	YA	YA	3,220.78	329.99	10.25%	3,193.44	324.32	10.16%
7	Kab. Cilacap	YA	YA	3,646.76	432.63	11.86%	3,503.69	426.92	12.18%
8	Kab. Demak	YA	YA	2,386.61	260.53	10.92%	2,449.63	278.46	11.37%
9	Kab. Grobogan	YA	YA	2,497.51	309.82	12.41%	2,652.10	305.51	11.52%
10	Kab. Jepara	YA	YA	2,135.51	141.76	6.64%	2,580.80	343.36	13.30%
11	Kab. Karanganyar	YA	YA	2,135.81	331.71	15.53%	2,126.54	308.61	14.51%
12	Kab. Kebumen	YA	YA	2,818.42	386.70	13.72%	2,843.73	367.86	12.94%
13	Kab. Kendal	YA	YA	2,312.19	345.40	14.94%	2,507.71	339.50	13.54%
14	Kab. Klaten	YA	YA	2,710.85	355.49	13.11%	2,700.86	335.89	12.44%
15	Kab. Kudus	YA	YA	1,848.49	172.50	9.33%	2,138.78	283.44	13.25%
16	Kab. Magelang	YA	YA	2,526.35	268.40	10.62%	2,693.00	275.22	10.22%
17	Kab. Pati	YA	YA	2,842.50	306.44	10.78%	2,781.04	279.68	10.06%
18	Kab. Pekalongan	YA	YA	2,256.23	245.29	10.87%	2,219.93	232.91	10.49%
19	Kab. Pemasang	YA	YA	2,836.83	373.11	13.15%	2,469.13	355.50	14.40%
20	Kab. Purbalingga	YA	YA	2,016.93	248.38	12.31%	2,077.81	269.53	12.97%
21	Kab. Purworejo	YA	YA	2,240.55	253.98	11.34%	2,480.52	243.99	9.84%
22	Kab. Rembang	YA	YA	1,830.58	201.95	11.03%	2,203.10	201.71	9.16%
23	Kab. Semarang	YA	YA	2,090.55	118.39	5.66%	2,562.94	269.01	10.50%
24	Kab. Sragen	YA	YA	2,265.50	336.86	14.87%	2,382.05	306.35	12.86%
25	Kab. Sukoharjo	YA	YA	2,247.46	294.95	13.12%	N/A	N/A	N/A
26	Kab. Tegal	YA	YA	2,894.61	350.88	12.12%	2,869.01	335.17	11.68%
27	Kab. Temanggung	YA	YA	1,949.35	228.30	11.71%	1,989.50	221.95	11.16%
28	Kab. Wonogiri	YA	YA	2,402.58	421.73	17.55%	2,293.57	402.50	17.55%
29	Kab. Wonosobo	YA	YA	1,967.75	242.93	12.35%	1,996.76	236.51	11.84%
30	Kota Magelang	YA	YA	980.19	127.82	13.04%	897.12	146.84	16.37%
31	Kota Pekalongan	YA	YA	983.95	136.13	13.84%	998.88	121.10	12.12%
32	Kota Salatiga	YA	YA	978.13	130.19	13.31%	918.60	138.41	15.07%
33	Kota Semarang	YA	YA	4,854.39	680.53	14.02%	5,544.23	919.08	16.58%
34	Kota Surakarta	YA	YA	1,974.61	299.13	15.15%	N/A	N/A	N/A
35	Kota Tegal	YA	YA	1,257.03	168.10	13.37%	1,164.68	154.96	13.31%

Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 30 Januari 2022, 18.00 WIB.







## DATA DUKUNG TPP APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TA 2021-2022

NO	DAERAH	PENGAJUAN TPP 2021		2021			2022		
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
16	Prov. Jawa Timur	YA	YA	33,008.20	4,153.29	12.58%	29,454.86	4,080.99	13.86%
1	Kab. Bangkalan	YA	YA	2,287.33	234.49	10.25%	2,454.75	221.34	9.02%
2	Kab. Banyuwangi	YA	YA	3,216.14	404.16	12.57%	3,005.97	183.19	6.09%
3	Kab. Blitar	YA	YA	2,314.92	307.50	13.28%	N/A	N/A	N/A
4	Kab. Bojonegoro	YA	YA	6,219.91	406.39	6.53%	5,947.60	359.51	6.04%
5	Kab. Bondowoso	TIDAK	YA	2,079.19	243.71	11.72%	1,972.49	242.63	12.30%
6	Kab. Gresik	YA	YA	3,433.49	326.05	9.50%	3,682.75	350.92	9.53%
7	Kab. Jember	YA	YA	4,448.91	594.64	13.37%	4,397.87	532.99	12.12%
8	Kab. Jombang	YA	YA	2,766.85	351.30	12.70%	2,722.75	332.18	12.20%
9	Kab. Kediri	YA	YA	3,168.89	396.46	12.51%	3,189.86	377.18	11.82%
10	Kab. Lamongan	YA	YA	2,938.94	336.73	11.46%	3,118.18	315.50	10.12%
11	Kab. Lumajang	YA	YA	2,232.11	248.62	11.14%	2,246.29	227.93	10.15%
12	Kab. Madiun	YA	YA	1,839.39	207.28	11.27%	1,965.32	194.15	9.88%
13	Kab. Magetan	YA	YA	1,898.61	279.65	14.73%	1,840.28	262.30	14.25%
14	Kab. Malang	YA	YA	4,295.12	532.78	12.40%	4,525.33	498.49	11.02%
15	Kab. Nganjuk	YA	YA	2,335.57	345.35	14.79%	2,430.99	360.32	14.82%
16	Kab. Ngawi	YA	YA	2,270.42	302.65	13.33%	2,287.32	287.42	12.57%
17	Kab. Pacitan	YA	YA	1,670.01	209.07	12.52%	1,654.07	199.90	12.09%
18	Kab. Pamekasan	YA	TIDAK	2,182.10	226.99	10.40%	2,305.57	210.63	9.14%
19	Kab. Pasuruan	YA	YA	3,453.88	415.64	12.03%	3,558.63	405.03	11.38%
20	Kab. Ponorogo	YA	YA	2,379.64	278.37	11.70%	2,518.77	252.56	10.03%
21	Kab. Probolinggo	YA	YA	2,513.85	103.38	4.11%	2,454.51	274.71	11.19%
22	Kab. Sampang	YA	YA	2,111.26	240.84	11.41%	2,071.54	234.40	11.32%
23	Kab. Sidoarjo	YA	YA	5,329.32	625.57	11.74%	5,446.31	623.23	11.44%
24	Kab. Situbondo	YA	YA	1,843.16	246.35	13.37%	2,082.99	197.27	9.47%
25	Kab. Sumenep	YA	YA	2,474.46	282.88	11.43%	2,644.25	277.49	10.49%
26	Kab. Trenggalek	YA	YA	1,951.64	276.36	14.16%	2,095.65	258.15	12.32%
27	Kab. Tuban	TIDAK	YA	2,457.05	322.48	13.12%	2,634.05	297.62	11.30%
28	Kab. Tulungagung	YA	YA	2,506.26	399.78	15.95%	2,666.84	365.82	13.72%
29	Kab. Mojokerto	YA	YA	2,595.74	369.53	14.24%	2,449.76	330.41	13.49%
30	Kota Batu	YA	YA	1,087.36	139.02	12.79%	1,116.16	166.21	14.89%
31	Kota Blitar	YA	YA	960.46	119.42	12.43%	1,022.31	112.84	11.04%
32	Kota Kediri	YA	YA	1,428.49	248.92	17.43%	1,525.93	261.83	17.16%
33	Kota Madiun	YA	YA	1,140.82	210.93	18.49%	1,158.49	216.37	18.68%
34	Kota Malang	YA	YA	2,554.77	459.55	17.99%	2,219.29	327.22	14.74%
35	Kota Mojokerto	YA	YA	1,042.61	127.59	12.24%	1,096.78	114.62	10.45%
36	Kota Pasuruan	YA	YA	1,066.47	135.53	12.71%	1,056.74	138.85	13.14%
37	Kota Probolinggo	YA	YA	1,089.91	173.88	15.95%	1,112.77	147.17	13.23%
38	Kota Surabaya	YA	YA	9,828.39	1,648.70	16.77%	10,397.91	1,667.96	16.04%

Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 30 Januari 2022, 18.00 WIB.





## DATA DUKUNG TPP APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TA 2021-2022

NO	DAERAH	PENGAJUAN TPP 2021		2021			2022		
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
17	<b>Prov. Kalimantan Barat</b>	<b>YA</b>	<b>YA</b>	<b>7,035.49</b>	<b>592.38</b>	<b>8.42%</b>	<b>5,684.42</b>	<b>601.75</b>	<b>10.59%</b>
1	Kab. Bengkayang	YA	YA	1,054.25	124.42	11.80%	1,327.53	118.82	8.95%
2	Kab. Kapuas hulu	YA	YA	1,747.11	189.02	10.82%	1,586.88	187.60	11.82%
3	Kab. Kayong Utara	TIDAK	YA	900.32	83.42	9.27%	766.96	87.23	11.37%
4	Kab. Ketapang	YA	YA	2,253.69	289.15	12.83%	2,238.33	306.30	13.68%
5	Kab. Kubu Raya	YA	YA	1,588.94	187.20	11.78%	1,661.00	196.23	11.81%
6	Kab. Landak	YA	YA	1,297.81	117.69	9.07%	1,330.65	155.52	11.69%
7	Kab. Melawi	TIDAK	YA	1,115.51	152.58	13.68%	1,049.33	135.46	12.91%
8	Kab. Mempawah	YA	YA	1,051.02	139.35	13.26%	1,086.16	143.69	13.23%
9	Kab. Sambas	YA	YA	1,755.32	199.79	11.38%	1,740.53	194.67	11.18%
10	Kab. Sanggau	YA	YA	1,657.33	194.22	11.72%	1,607.40	211.07	13.13%
11	Kab. Sekadau	TIDAK	YA	845.61	110.82	13.10%	N/A	N/A	N/A
12	Kab. Sintang	TIDAK	YA	1,955.27	228.79	11.70%	1,789.14	212.95	11.90%
13	Kota Pontianak	YA	YA	1,869.50	330.28	17.67%	1,821.54	264.07	14.50%
14	Kota Singkawang	YA	YA	926.18	114.12	12.32%	805.20	111.82	13.89%

Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 30 Januari 2022, 18.00 WIB.







## DATA DUKUNG TPP APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TA 2021-2022

NO	DAERAH	PENGAJUAN TPP 2021		2021			2022		
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
18	<b>Prov. Kalimantan Tengah</b>	<b>YA</b>	<b>YA</b>	<b>4,889.70</b>	<b>674.38</b>	<b>13.79%</b>	<b>5,191.68</b>	<b>507.65</b>	<b>9.78%</b>
1	Kab. Barito Selatan	YA	YA	1,054.48	162.69	15.43%	1,019.71	150.95	14.80%
2	Kab. Barito Timur	YA	TIDAK	1,023.67	85.95	8.40%	945.68	98.13	10.38%
3	Kab. Barito Utara	TIDAK	YA	1,136.36	168.42	14.82%	1,162.85	162.17	13.95%
4	Kab. Gunung Mas	YA	YA	1,044.26	129.19	12.37%	1,104.90	154.88	14.02%
5	Kab. Kapuas	TIDAK	TIDAK	2,293.49	198.19	8.64%	2,109.87	204.03	9.67%
6	Kab. Katingan	YA	TIDAK	1,341.15	157.31	11.73%	1,378.00	155.28	11.27%
7	Kab. Kotawaringin Barat	YA	YA	1,489.84	183.67	12.33%	1,361.14	198.72	14.60%
8	Kab. Kotawaringin Timur	TIDAK	YA	1,871.88	210.59	11.25%	1,932.81	244.58	12.65%
9	Kab. Lamandau	YA	YA	830.05	123.35	14.86%	891.37	97.55	10.94%
10	Kab. Murung Raya	YA	YA	1,196.12	200.13	16.73%	1,273.10	206.84	16.25%
11	Kab. Pulang Pisau	YA	TIDAK	982.95	150.17	15.28%	1,013.60	138.87	13.70%
12	Kab. Seruyan	YA	YA	1,237.93	100.62	8.13%	1,117.58	180.38	16.14%
13	Kab. Sukamara	YA	YA	646.55	82.33	12.73%	681.88	89.45	13.12%
14	Kota Palangkaraya	YA	TIDAK	1,143.17	204.99	17.93%	1,244.57	203.69	16.37%

Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 30 Januari 2022, 18.00 WIB.





## DATA DUKUNG TPP APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TA 2021-2022

NO	DAERAH	PENGAJUAN TPP 2021		2021			2022		
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
19	Prov. Kalimantan Selatan	YA	YA	5,526.17	631.16	11.42%	6,243.84	790.23	12.66%
1	Kab. Balangan	YA	TIDAK	1,143.29	166.42	14.56%	1,232.64	174.60	14.17%
2	Kab. Banjar	TIDAK	YA	1,948.61	331.70	17.02%	1,472.14	206.72	14.04%
3	Kab. Barito Kuala	YA	YA	1,271.67	185.74	14.61%	1,298.99	209.52	16.13%
4	Kab. Hulu Sungai Selatan	YA	YA	1,348.12	190.29	14.12%	1,373.82	215.76	15.71%
5	Kab. Hulu Sungai Tengah	YA	YA	1,471.00	229.38	15.59%	N/A	N/A	N/A
6	Kab. Hulu Sungai Utara	YA	YA	1,426.77	64.39	4.51%	1,301.24	139.25	10.70%
7	Kab. Kotabaru	YA	YA	1,623.01	219.49	13.52%	1,549.13	226.31	14.61%
8	Kab. Tabalong	YA	YA	1,411.81	172.09	12.19%	1,465.36	176.01	12.01%
9	Kab. Tanah Bumbu	YA	TIDAK	1,838.92	215.79	11.73%	1,792.02	192.16	10.72%
10	Kab. Tanah Laut	YA	YA	1,833.34	246.56	13.45%	1,635.55	204.77	12.52%
11	Kab. Tapin	TIDAK	YA	1,416.37	170.77	12.06%	1,683.55	202.33	12.02%
12	Kota Banjar Baru	YA	TIDAK	1,052.74	171.05	16.25%	1,084.83	164.61	15.17%
13	Kota Banjarmasin	YA	YA	1,729.13	337.45	19.52%	2,047.46	334.14	16.32%

Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 30 Januari 2022, 18.00 WIB.





## DATA DUKUNG TPP APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TA 2021-2022

NO	DAERAH	PENGAJUAN TPP 2021		2021			2022		
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
<b>20</b>	<b>Prov. Kalimantan Timur</b>	<b>TIDAK</b>	<b>YA</b>	<b>11,616.19</b>	<b>1,288.51</b>	<b>11.09%</b>	<b>11,501.77</b>	<b>1,353.91</b>	<b>11.77%</b>
1	Kab. Berau	YA	YA	1,850.40	287.35	15.53%	2,050.80	296.20	14.44%
2	Kab. Kutai Barat	YA	YA	2,241.84	226.23	10.09%	2,651.63	305.52	11.52%
3	Kab. Kutai Kertanegara	TIDAK	TIDAK	4,144.45	652.24	15.74%	5,264.00	836.40	15.89%
4	Kab. Kutai Timur	TIDAK	YA	2,844.28	403.55	14.19%	2,949.44	451.17	15.30%
5	Kab. Mahakam Ulu	TIDAK	YA	1,881.03	150.18	7.98%	1,088.40	118.00	10.84%
6	Kab. Paser	TIDAK	TIDAK	1,909.29	297.03	15.56%	2,693.18	357.06	13.26%
7	Kab. Penajam Paser Utara	TIDAK	TIDAK	1,838.80	264.80	14.40%	1,109.67	244.26	22.01%
8	Kota Balikpapan	YA	TIDAK	2,283.79	409.41	17.93%	2,602.16	405.80	15.59%
9	Kota Bontang	YA	YA	1,313.58	327.50	24.93%	1,294.09	283.14	21.88%
10	Kota Samarinda	YA	YA	2,591.83	347.23	13.40%	2,733.67	380.41	13.92%
<b>21</b>	<b>Prov. Kalimantan Utara</b>	<b>YA</b>	<b>YA</b>	<b>2,364.06</b>	<b>376.28</b>	<b>15.92%</b>	<b>2,404.94</b>	<b>488.44</b>	<b>20.31%</b>
1	Kab. Bulungan	YA	YA	1,269.03	209.24	16.49%	1,277.70	177.49	13.89%
2	Kab. Malinau	YA	YA	1,378.50	157.05	11.39%	1,383.57	215.43	15.57%
3	Kab. Nunukan	TIDAK	YA	1,324.43	172.97	13.06%	1,229.61	174.12	14.16%
4	Kab. Tana Tidung	YA	TIDAK	813.04	161.70	19.89%	689.03	163.10	23.67%
5	Kota Tarakan	YA	YA	1,004.56	205.27	20.43%	1,073.40	197.16	18.37%
<b>22</b>	<b>Prov. Sulawesi Barat</b>	<b>TIDAK</b>	<b>YA</b>	<b>2,062.54</b>	<b>180.90</b>	<b>8.77%</b>	<b>2,015.66</b>	<b>205.72</b>	<b>10.21%</b>
1	Kab. Majene	YA	YA	904.74	111.53	12.33%	861.65	107.64	12.49%
2	Kab. Mamasa	YA	TIDAK	957.23	66.73	6.97%	1,114.89	73.40	6.58%
3	Kab. Mamuju	TIDAK	YA	1,105.30	94.63	8.56%	1,094.52	105.24	9.62%
4	Kab. Mamuju Tengah	TIDAK	TIDAK	626.00	31.64	5.05%	613.90	28.53	4.65%
5	Kab. Pasang Kayu	TIDAK	TIDAK	836.12	54.14	6.47%	860.40	53.74	6.25%
6	Kab. Polewali Mandar	YA	YA	1,532.25	150.52	9.82%	N/A	N/A	N/A

Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 30 Januari 2022, 18.00 WIB.





## DATA DUKUNG TPP APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TA 2021-2022

NO	DAERAH	PENGAJUAN TPP 2021		2021			2022		
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
<b>23</b>	<b>Prov. Sulawesi Utara</b>	<b>TIDAK</b>	<b>TIDAK</b>	<b>4,087.62</b>	<b>526.19</b>	<b>12.87%</b>	<b>3,817.65</b>	<b>529.21</b>	<b>13.86%</b>
1	Kab. Bolaang Mongondow	TIDAK	TIDAK	1,057.46	105.50	9.98%	1,065.20	109.08	10.24%
2	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	YA	YA	615.33	60.71	9.87%	542.92	59.02	10.87%
3	Kab. Bolaang Mongondow Timur	YA	YA	567.44	76.80	13.53%	604.14	71.49	11.83%
4	Kab. Bolaang Mongondow Utara	TIDAK	YA	736.23	62.28	8.46%	680.56	51.21	7.53%
5	Kab. Kep. Talaud	TIDAK	TIDAK	1,082.11	128.71	11.89%	998.98	92.19	9.23%
6	Kab. Minahasa	YA	YA	1,338.58	197.48	14.75%	1,312.34	179.33	13.66%
7	Kab. Minahasa Selatan	TIDAK	YA	951.89	142.82	15.00%	915.44	140.46	15.34%
8	Kab. Minahasa Tenggara	YA	YA	731.17	58.98	8.07%	676.66	88.66	13.10%
9	Kab. Minahasa Utara	TIDAK	YA	1,009.47	146.46	14.51%	995.61	103.62	10.41%
10	Kab. Siau Tagulandang Biaro	TIDAK	YA	640.67	88.33	13.79%	582.14	86.06	14.78%
11	Kab. Kep. Sangihe	YA	TIDAK	974.24	158.31	16.25%	975.63	155.49	15.94%
12	Kota Bitung	YA	YA	853.40	135.61	15.89%	882.67	133.97	15.18%
13	Kota Kotamobagu	YA	YA	638.07	78.03	12.23%	622.66	71.87	11.54%
14	Kota Manado	YA	YA	1,599.89	275.39	17.21%	1,934.90	250.57	12.95%
15	Kota Tomohon	TIDAK	YA	657.10	83.64	12.73%	671.11	89.03	13.27%

Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 30 Januari 2022, 18.00 WIB.





## DATA DUKUNG TPP APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TA 2021-2022

NO	DAERAH	PENGAJUAN TPP 2021		2021			2022		
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
<b>24</b>	<b>Prov. Gorontalo</b>	<b>YA</b>	<b>YA</b>	<b>1,912.52</b>	<b>242.15</b>	<b>12.66%</b>	<b>1,739.47</b>	<b>245.78</b>	<b>14.13%</b>
1	Kab. Boalemo	TIDAK	YA	843.99	75.82	8.98%	797.21	85.10	10.68%
2	Kab. Bone Bolango	YA	YA	1,072.20	103.18	9.62%	902.86	105.40	11.67%
3	Kab. Gorontalo	YA	YA	1,943.96	185.88	9.56%	1,503.88	188.28	12.52%
4	Kab. Gorontalo Utara	YA	YA	784.78	82.86	10.56%	976.34	84.67	8.67%
5	Kab. Pohuwato	TIDAK	YA	928.57	99.13	10.68%	971.86	102.58	10.55%
6	Kota Gorontalo	YA	YA	1,336.73	135.23	10.12%	1,222.31	133.72	10.94%
<b>25</b>	<b>Prov. Sulawesi Tengah</b>	<b>YA</b>	<b>YA</b>	<b>4,297.16</b>	<b>447.05</b>	<b>10.40%</b>	<b>4,728.76</b>	<b>485.63</b>	<b>10.27%</b>
1	Kab. Banggai	YA	TIDAK	2,013.16	211.50	10.51%	2,317.59	279.02	12.04%
2	Kab. Banggai Kepulauan	YA	TIDAK	865.25	96.40	11.14%	N/A	N/A	N/A
3	Kab. Banggai Laut	TIDAK	YA	666.38	96.50	14.48%	598.73	58.00	9.69%
4	Kab. Buol	YA	YA	959.70	92.53	9.64%	848.45	93.62	11.03%
5	Kab. Donggala	TIDAK	TIDAK	1,285.63	125.44	9.76%	1,220.72	124.06	10.16%
6	Kab. Morowali	YA	YA	1,374.98	129.04	9.39%	1,475.30	129.14	8.75%
7	Kab. Morowali Utara	TIDAK	YA	1,082.41	129.08	11.93%	1,133.53	155.29	13.70%
8	Kab. Parigi Moutong	YA	YA	1,527.06	177.04	11.59%	1,605.53	179.71	11.19%
9	Kab. Poso	YA	TIDAK	1,357.88	143.20	10.55%	1,263.51	150.03	11.87%
10	Kab. Sigi	TIDAK	YA	1,292.35	129.88	10.05%	1,198.53	108.28	9.03%
11	Kab. Tojo Una-Una	YA	TIDAK	1,045.28	89.54	8.57%	1,065.65	91.19	8.56%
12	Kab. Toli-Toli	TIDAK	YA	1,195.61	137.71	11.52%	1,120.31	96.69	8.63%
13	Kota Palu	YA	YA	1,630.27	164.00	10.06%	1,589.13	159.28	10.02%

Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 30 Januari 2022, 18.00 WIB.





## DATA DUKUNG TPP APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TA 2021-2022

NO	DAERAH	PENGAJUAN TPP 2021		2021			2022		
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
<b>26</b>	<b>Prov. Sulawesi Selatan</b>	<b>YA</b>	<b>YA</b>	<b>12,046.41</b>	<b>1,533.79</b>	<b>12.73%</b>	<b>9,109.28</b>	<b>1,300.62</b>	<b>14.28%</b>
1	Kab. Bantaeng	YA	YA	1,113.82	109.68	9.85%	N/A	N/A	N/A
2	Kab. Barru	YA	YA	959.48	123.67	12.89%	902.34	113.55	12.58%
3	Kab. Bone	YA	YA	2,887.64	294.52	10.20%	2,615.03	309.94	11.85%
4	Kab. Bulu Kumba	YA	YA	1,532.69	168.43	10.99%	1,545.41	150.15	9.72%
5	Kab. Enrekang	YA	TIDAK	1,585.65	138.26	8.72%	910.86	88.67	9.73%
6	Kab. Gowa	YA	YA	2,144.41	213.98	9.98%	1,931.05	204.09	10.57%
7	Kab. Jeneponto	YA	YA	1,291.35	152.26	11.79%	1,211.19	153.70	12.69%
8	Kab. Luwu	YA	YA	1,474.50	157.36	10.67%	1,380.41	153.31	11.11%
9	Kab. Luwu Timur	YA	YA	1,516.77	185.02	12.20%	1,597.66	177.81	11.13%
10	Kab. Luwu Utara	YA	TIDAK	1,710.36	138.47	8.10%	1,451.80	134.39	9.26%
11	Kab. Maros	YA	TIDAK	1,475.19	160.34	10.87%	1,502.96	138.42	9.21%
12	Kab. Pangkep	YA	TIDAK	1,376.92	175.71	12.76%	1,447.24	181.41	12.53%
13	Kab. Pinrang	YA	TIDAK	1,448.12	191.07	13.19%	1,373.73	157.69	11.48%
14	Kab. Kepulauan Selayar	YA	TIDAK	1,111.30	123.57	11.12%	1,136.01	91.57	8.06%
15	Kab. Sidrap	YA	TIDAK	1,268.68	131.54	10.37%	1,231.16	124.94	10.15%
16	Kab. Sinjai	YA	YA	1,216.61	139.28	11.45%	1,123.79	134.64	11.98%
17	Kab. Soppeng	YA	TIDAK	1,202.60	174.51	14.51%	1,264.65	154.25	12.20%
18	Kab. Takalar	YA	TIDAK	1,195.70	166.90	13.96%	1,564.56	172.03	11.00%
19	Kab. Tanatoraja	YA	YA	1,197.93	112.62	9.40%	N/A	N/A	N/A
20	Kab. Toraja Utara	TIDAK	TIDAK	1,152.35	131.97	11.45%	1,048.80	113.43	10.81%
21	Kab. Wajo	YA	TIDAK	1,574.12	170.31	10.82%	1,424.17	159.59	11.21%
22	Kota Makassar	YA	YA	4,222.83	589.30	13.96%	4,962.27	520.99	10.50%
23	Kota Palopo	YA	YA	986.61	105.20	10.66%	992.93	102.04	10.28%
24	Kota Pare-Pare	TIDAK	TIDAK	951.78	55.58	5.84%	923.24	91.78	9.94%

Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 30 Januari 2022, 18.00 WIB.





## DATA DUKUNG TPP APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TA 2021-2022

NO	DAERAH	PENGAJUAN TPP 2021		2021			2022		
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
<b>27</b>	<b>Prov. Sulawesi Tenggara</b>	<b>TIDAK</b>	<b>TIDAK</b>	<b>5,235.19</b>	<b>478.61</b>	<b>9.14%</b>	<b>4,767.32</b>	<b>493.90</b>	<b>10.36%</b>
1	Kab. Bombana	TIDAK	TIDAK	1,105.78	95.00	8.59%	1,102.12	85.25	7.73%
2	Kab. Buton	TIDAK	YA	962.31	77.67	8.07%	694.44	70.81	10.20%
3	Kab. Buton Utara	YA	TIDAK	679.67	57.62	8.48%	864.00	44.63	5.17%
4	Kab. Kolaka	YA	YA	1,298.17	105.89	8.16%	1,222.14	107.40	8.79%
5	Kab. Kolaka Timur	YA	YA	731.64	52.94	7.24%	742.07	55.10	7.43%
6	Kab. Kolaka Utara	YA	YA	974.21	42.19	4.33%	864.54	43.68	5.05%
7	Kab. Konawe	TIDAK	TIDAK	1,387.32	88.21	6.36%	1,470.23	94.03	6.40%
8	Kab. Konawe Kepulauan	YA	YA	600.93	19.43	3.23%	519.76	22.13	4.26%
9	Kab. Konawe Selatan	TIDAK	TIDAK	1,416.14	121.72	8.60%	1,724.88	141.04	8.18%
10	Kab. Konawe Utara	TIDAK	TIDAK	964.11	85.28	8.85%	1,270.99	81.92	6.45%
11	Kab. Muna	TIDAK	TIDAK	1,735.45	99.36	5.73%	1,447.11	99.14	6.85%
12	Kab. Wakatobi	YA	YA	1,021.10	88.63	8.68%	852.17	88.14	10.34%
13	Kota Bau-Bau	TIDAK	TIDAK	1,122.78	131.67	11.73%	1,045.53	116.50	11.14%
14	Kota Kendari	YA	TIDAK	1,835.25	186.68	10.17%	1,866.66	186.27	9.98%
15	Kab. Buton Selatan	TIDAK	TIDAK	706.16	37.70	5.34%	555.98	35.06	6.31%
16	Kab. Buton Tengah	YA	TIDAK	677.43	54.83	8.09%	655.56	57.99	8.85%
17	Kab. Muna Barat	TIDAK	TIDAK	659.93	47.66	7.22%	807.07	44.44	5.51%

Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 30 Januari 2022, 18.00 WIB.







## DATA DUKUNG TPP APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TA 2021-2022

NO	DAERAH	PENGAJUAN TPP 2021		2021			2022		
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
<b>29</b>	<b>Prov. Nusa Tenggara Barat</b>	<b>YA</b>	<b>YA</b>	<b>5,528.93</b>	<b>519.53</b>	<b>9.40%</b>	<b>5,961.58</b>	<b>599.51</b>	<b>10.06%</b>
1	Kab. Bima	YA	YA	1,850.15	182.01	9.84%	1,803.81	179.80	9.97%
2	Kab. Dompu	YA	YA	1,069.39	106.17	9.93%	1,140.98	95.02	8.33%
3	Kab. Lombok Barat	YA	YA	1,709.66	99.00	5.79%	1,728.71	201.98	11.68%
4	Kab. Lombok Timur	YA	YA	3,121.70	334.88	10.73%	3,215.55	328.56	10.22%
5	Kab. Lombok Utara	YA	YA	915.75	100.00	10.92%	894.25	86.02	9.62%
6	Kab. Sumbawa	YA	YA	1,673.87	237.69	14.20%	1,818.31	238.34	13.11%
7	Kab. Sumbawa Barat	YA	TIDAK	957.52	123.23	12.87%	1,073.66	121.86	11.35%
8	Kab. Lombok Tengah	YA	TIDAK	2,199.99	308.42	14.02%	2,466.85	314.13	12.73%
9	Kota Bima	YA	YA	764.75	106.91	13.98%	776.43	111.05	14.30%
10	Kota Mataram	YA	YA	1,441.08	189.36	13.14%	1,423.90	179.83	12.63%







## DATA DUKUNG TPP APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TA 2021-2022

NO	DAERAH	PENGAJUAN TPP 2021		2021			2022		
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
<b>30</b>	<b>Prov. Nusa Tenggara Timur</b>	<b>TIDAK</b>	<b>YA</b>	<b>7,584.93</b>	<b>542.15</b>	<b>7.15%</b>	<b>5,486.76</b>	<b>566.09</b>	<b>10.32%</b>
1	Kab. Alor	YA	TIDAK	1,096.36	30.09	2.74%	1,061.91	31.63	2.98%
2	Kab. Belu	TIDAK	TIDAK	935.65	48.99	5.24%	968.71	77.53	8.00%
3	Kab. Ende	TIDAK	YA	1,176.50	98.06	8.34%	1,419.20	91.49	6.45%
4	Kab. Flores Timur	YA	YA	1,114.63	106.85	9.59%	1,102.32	99.14	8.99%
5	Kab. Kupang	YA	YA	1,271.97	133.35	10.48%	1,324.08	132.35	10.00%
6	Kab. Lembata	TIDAK	YA	905.41	66.15	7.31%	1,065.14	60.21	5.65%
7	Kab. Malaka	TIDAK	YA	905.82	75.72	8.36%	837.40	56.15	6.71%
8	Kab. Manggarai	YA	YA	1,163.84	91.79	7.89%	1,431.83	98.66	6.89%
9	Kab. Manggarai Barat	YA	TIDAK	1,275.56	93.02	7.29%	1,628.49	95.77	5.88%
10	Kab. Manggarai Timur	YA	YA	1,329.22	78.57	5.91%	1,279.63	88.04	6.88%
11	Kab. Nagekeo	YA	TIDAK	830.08	81.89	9.87%	795.01	71.44	8.99%
12	Kab. Ngada	YA	YA	847.93	65.88	7.77%	947.73	71.05	7.50%
13	Kab. Rote Ndao	TIDAK	YA	796.15	72.82	9.15%	846.90	75.78	8.95%
14	Kab. Sabu Raijua	YA	YA	735.59	50.63	6.88%	637.95	45.28	7.10%
15	Kab. Sikka	TIDAK	TIDAK	1,494.50	111.12	7.44%	1,366.23	104.91	7.68%
16	Kab. Sumba Barat	TIDAK	TIDAK	723.01	13.15	1.82%	690.52	12.87	1.86%
17	Kab. Sumba Barat Daya	TIDAK	TIDAK	1,146.82	33.66	2.94%	1,128.60	46.84	4.15%
18	Kab. Sumba Tengah	YA	YA	614.36	43.71	7.11%	670.49	25.36	3.78%
19	Kab. Sumba Timur	YA	YA	1,121.20	86.25	7.69%	1,239.90	70.15	5.66%
20	Kab. Timor Tengah Selatan	YA	YA	1,492.12	115.69	7.75%	1,621.24	43.69	2.69%
21	Kab. Timor Tengah Utara	TIDAK	TIDAK	1,133.55	55.03	4.85%	1,248.61	48.28	3.87%
22	Kota Kupang	YA	YA	1,176.61	164.82	14.01%	1,134.36	171.23	15.09%

Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 30 Januari 2022, 18.00 WIB.





## DATA DUKUNG TPP APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TA 2021-2022

NO	DAERAH	PENGAJUAN TPP 2021		2021			2022		
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
<b>31</b>	<b>Prov. Maluku</b>	<b>TIDAK</b>	<b>YA</b>	<b>4,015.22</b>	<b>320.23</b>	<b>7.98%</b>	<b>3,098.43</b>	<b>320.16</b>	<b>10.33%</b>
1	Kab. Buru	YA	TIDAK	891.89	86.11	9.66%	N/A	N/A	N/A
2	Kab. Buru Selatan	TIDAK	TIDAK	743.08	29.46	3.96%	N/A	N/A	N/A
3	Kab. Kep. Aru	TIDAK	TIDAK	886.81	76.12	8.58%	N/A	N/A	N/A
4	Kab. Maluku Barat Daya	TIDAK	TIDAK	1,101.57	69.28	6.29%	1,328.36	62.75	4.72%
5	Kab. Maluku Tengah	TIDAK	TIDAK	1,787.80	152.75	8.54%	1,649.92	169.08	10.25%
6	Kab. Maluku Tenggara	TIDAK	TIDAK	1,074.87	46.78	4.35%	1,021.26	34.72	3.40%
7	Kab. Kep. Tanimbar	TIDAK	TIDAK	1,034.97	112.94	10.91%	N/A	N/A	N/A
8	Kab. Seram Bagian Barat	TIDAK	TIDAK	1,057.58	64.20	6.07%	1,016.21	66.27	6.52%
9	Kab. Seram Bagian Timur	TIDAK	TIDAK	966.09	65.09	6.74%	944.46	47.63	5.04%
10	Kota Ambon	TIDAK	YA	1,290.13	136.34	10.57%	1,155.62	131.03	11.34%
11	Kota Tual	YA	YA	757.92	42.18	5.57%	N/A	N/A	N/A
<b>32</b>	<b>Prov. Maluku Utara</b>	<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>	<b>3,335.96</b>	<b>242.44</b>	<b>7.27%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
1	Kab. Halmahera Barat	TIDAK	TIDAK	924.12	88.93	9.62%	1,133.66	92.31	8.14%
2	Kab. Halmahera Selatan	YA	YA	1,452.78	82.68	5.69%	1,477.00	111.88	7.57%
3	Kab. Halmahera Tengah	TIDAK	TIDAK	1,233.18	30.19	2.45%	N/A	N/A	N/A
4	Kab. Halmahera Timur	TIDAK	TIDAK	966.16	29.57	3.06%	N/A	N/A	N/A
5	Kab. Halmahera Utara	YA	TIDAK	1,204.46	101.84	8.45%	N/A	N/A	N/A
6	Kab. Kepl. Sula	YA	YA	838.19	65.41	7.80%	808.90	68.41	8.46%
7	Kab. Pulau Morotai	YA	TIDAK	839.58	67.57	8.05%	N/A	N/A	N/A
8	Kab. Pulau Taliabu	YA	TIDAK	594.98	34.26	5.76%	N/A	N/A	N/A
9	Kota Ternate	YA	YA	996.15	146.87	14.74%	1,010.37	139.54	13.81%
10	Kota Tidore Kepulauan	YA	YA	950.55	91.77	9.65%	960.62	93.85	9.77%

Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 30 Januari 2022, 18.00 WIB.





## DATA DUKUNG TPP APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TA 2021-2022

NO	DAERAH	PENGAJUAN TPP 2021		2021			2022		
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
<b>33</b>	<b>Prov. Papua</b>	<b>YA</b>	<b>TIDAK</b>	<b>15,758.96</b>	<b>1,610.82</b>	<b>10.22%</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>	<b>N/A</b>
1	Kab. Asmat	YA	TIDAK	1,500.38	184.99	12.33%	1,556.50	187.36	12.04%
2	Kab. Biak Numfor	TIDAK	YA	1,284.39	113.03	8.80%	1,473.52	93.87	6.37%
3	Kab. Boven Digoel	TIDAK	TIDAK	1,196.28	103.95	8.69%	N/A	N/A	N/A
4	Kab. Deiyai	TIDAK	TIDAK	781.74	91.76	11.74%	N/A	N/A	N/A
5	Kab. Dogiyai	TIDAK	TIDAK	891.68	81.76	9.17%	N/A	N/A	N/A
6	Kab. Intan Jaya	YA	YA	1,072.09	116.34	10.85%	N/A	N/A	N/A
7	Kab. Jayapura	TIDAK	TIDAK	1,466.64	84.58	5.77%	1,425.07	128.74	9.03%
8	Kab. Jayawijaya	TIDAK	YA	1,468.40	137.12	9.34%	1,584.23	140.96	8.90%
9	Kab. Keerom	TIDAK	TIDAK	814.46	96.74	11.88%	N/A	N/A	N/A
10	Kab. Kepulauan Yapen	TIDAK	TIDAK	1,296.53	128.93	9.94%	N/A	N/A	N/A
11	Kab. Lanny Jaya	TIDAK	TIDAK	1,294.86	87.35	6.75%	1,519.89	97.36	6.41%
12	Kab. Mamberamo Raya	TIDAK	TIDAK	980.29	93.88	9.58%	N/A	N/A	N/A
13	Kab. Mappi	TIDAK	YA	1,321.81	102.26	7.74%	N/A	N/A	N/A
14	Kab. Mamberamo Tengah	TIDAK	TIDAK	986.96	114.82	11.63%	N/A	N/A	N/A
15	Kab. Merauke	TIDAK	TIDAK	2,040.85	219.10	10.74%	N/A	N/A	N/A
16	Kab. Mimika	TIDAK	TIDAK	3,255.20	543.84	16.71%	N/A	N/A	N/A
17	Kab. Nabire	TIDAK	TIDAK	1,094.39	118.96	10.87%	1,187.17	107.15	9.03%
18	Kab. Nduga	TIDAK	TIDAK	963.01	75.97	7.89%	N/A	N/A	N/A
19	Kab. Paniai	TIDAK	TIDAK	1,202.78	116.42	9.68%	N/A	N/A	N/A
20	Kab. Pegunungan Bintang	TIDAK	TIDAK	1,393.67	195.88	14.06%	N/A	N/A	N/A
21	Kab. Puncak	TIDAK	TIDAK	1,403.23	188.53	13.44%	1,522.68	214.03	14.06%
22	Kab. Puncak Jaya	TIDAK	TIDAK	1,344.16	201.18	14.97%	1,487.52	105.00	7.06%
23	Kab. Sarmi	YA	TIDAK	998.13	78.03	7.82%	1,020.31	83.75	8.21%
24	Kab. Supiori	TIDAK	TIDAK	683.06	56.12	8.22%	N/A	N/A	N/A
25	Kab. Tolikara	TIDAK	TIDAK	1,539.51	103.27	6.71%	N/A	N/A	N/A
26	Kab. Waropen	TIDAK	TIDAK	844.42	54.94	6.51%	N/A	N/A	N/A
27	Kab. Yahukimo	TIDAK	TIDAK	1,522.70	204.13	13.41%	N/A	N/A	N/A
28	Kab. Yalimo	TIDAK	YA	1,089.55	116.07	10.65%	N/A	N/A	N/A
29	Kota Jayapura	TIDAK	TIDAK	1,282.69	203.81	15.89%	1,337.14	217.41	16.26%

Sumber Data: Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD), 30 Januari 2022, 18.00 WIB.





## DATA DUKUNG TPP APBD PROVINSI & KABUPATEN/KOTA TA 2021-2022

NO	DAERAH	PENGAJUAN TPP 2021		2021			2022		
		SEMESTER 1	SEMESTER 2	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%	ALOKASI BELANJA	ALOKASI TPP	%
1	2	3	4	5	6	7=6/5	8	9	10=9/8
<b>34</b>	<b>Prov. Papua Barat</b>	<b>TIDAK</b>	<b>TIDAK</b>	<b>7,744.11</b>	<b>349.81</b>	<b>4.52%</b>	<b>6,778.26</b>	<b>472.60</b>	<b>6.97%</b>
1	Kab. Fak-Fak	TIDAK	YA	1,277.68	136.12	10.65%	N/A	N/A	N/A
2	Kab. Kaimana	YA	TIDAK	1,065.61	136.60	12.82%	N/A	N/A	N/A
3	Kab. Kep. Raja Ampat	YA	TIDAK	1,390.31	222.76	16.02%	1,349.00	85.00	6.30%
4	Kab. Manokwari	TIDAK	TIDAK	1,293.05	192.32	14.87%	1,353.74	215.16	15.89%
5	Kab. Manokwari Selatan	TIDAK	TIDAK	619.06	42.33	6.84%	573.90	37.45	6.53%
6	Kab. Maybrat	TIDAK	TIDAK	945.21	53.61	5.67%	N/A	N/A	N/A
7	Kab. Pegunungan Arfak	TIDAK	TIDAK	861.20	37.80	4.39%	869.31	35.06	4.03%
8	Kab. Sorong	TIDAK	TIDAK	1,276.76	52.03	4.08%	N/A	N/A	N/A
9	Kab. Sorong Selatan	TIDAK	TIDAK	819.39	20.96	2.56%	1,059.51	74.87	7.07%
10	Kab. Tambrauw	TIDAK	YA	831.97	20.56	2.47%	1,140.84	32.40	2.84%
11	Kab. Teluk Bintuni	TIDAK	TIDAK	2,048.62	137.94	6.73%	N/A	N/A	N/A
12	Kab. Teluk Wondama	YA	TIDAK	913.64	65.23	7.14%	N/A	N/A	N/A
13	Kota Sorong	TIDAK	TIDAK	1,061.11	72.34	6.82%	1,088.61	73.59	6.76%

